

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terbagi menjadi tiga subbab, yaitu gambaran objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. Objek penelitian yang dideskripsikan adalah diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam konteks kebijakan *Minimum Essentials Force* dan *ASEAN Political Security Community*. Dilanjutkan dengan analisis data berupa paparan reduksi data serta penyajian data primer dan data sekunder yang telah diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian pada subbab pembahasan, tertulis bahasan-bahasan yang diperoleh atas hasil analisis data sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji adalah diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam konteks kebijakan *Minimum Essentials Force* (MEF) sebagai upaya membangun kekuatan pertahanan negara dan *ASEAN Political Security Community* (APSC) sebagai wujud komunitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Berkaitan dengan sumber data yang diperoleh, ketiga objek penelitian ini termasuk ke dalam sumber data primer dan sekunder karena beberapa pernyataan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber penelitian, serta didukung dengan beberapa dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam konteks MEF dan APSC.

4.1.1 Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN

Di Asia Tenggara, Indonesia telah membangun interaksi militer-ke-militer yang luas dengan negara-negara kawasan. Terlepas dari masalah-masalah terkait perbatasan yang belum terselesaikan, diplomasi

pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN berfokus pada tidak hanya menjaga integritas teritorial namun juga memastikan keamanan kawasan Asia Tenggara. Diplomasi pertahanan Indonesia-ASEAN juga hadir dalam berbagai ragam bentuk kerjasama, yakni bilateral, trilateral, dan multilateral yang kebanyakan dari diplomasinya berada di dalam kerangka kerjasama ASEAN.

Secara bilateral, Singapura adalah mitra terdepan dalam diplomasi pertahanan bilateral Indonesia di Asia Tenggara. Setiap tahun, kedua negara melakukan latihan militer gabungan intensif dan program pelatihan untuk meningkatkan interoperabilitas mereka pada bidang-bidang yang merupakan kepentingan bersama, seperti bantuan penanggulangan bencana dan keamanan maritim (Gindarsah, 2015). Lebih lanjut, Malaysia berada di posisi kedua sebagai negara yang memiliki hubungan pertahanan yang erat dengan Indonesia. Secara praktek, diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia lebih banyak berfokus kepada kunjungan resmi antar pejabat militer. Namun, tetap saja Indonesia dan Malaysia memiliki sejumlah latihan gabungan militer yang dilakukan secara bersama setiap tahunnya.

Di sisi lain, Indonesia sedang terus berusaha meningkatkan hubungan pertahanannya dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai contohnya dengan Kamboja. Meskipun sejak tahun 2012 Indonesia telah melatih sekitar 200 tentara Kamboja, namun diplomasi pertahanan di antara keduanya baru akan meningkat di tahun 2016 ketika keduanya merencanakan penanda tangan *Memorandum of Understanding (MoU)* oleh Kementerian Pertahanan dari kedua negara dan sektor-sektor pertahanan terkait (Turton, 2016). Dan bahkan, Indonesia juga menawarkan Kerajaan tersebut untuk terlibat dalam patroli terkoordinasi di wilayah Asia Tenggara.

Di samping itu, pada sebuah kunjungan yang dilakukan Sekretaris Jenderal Partai Vietnam, Nguyen Phu Trong, pada bulan Agustus 2017, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mendorong kerjasama pertahanan mereka ke arah yang lebih baik dengan komitmen untuk berkoordinasi

erat satu sama lain dalam perang melawan terorisme, kejahatan siber, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional yang diwujudkan melalui penanda tangan deklarasinya bersama (Nguyen, 2017). Upaya peningkatan kerjasama pertahanan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut diplomasi yang telah mereka bangun sebelumnya, yakni dalam bentuk kunjungan antar pejabat tinggi militer, pelatihan personil militer, operasi penjaga perdamaian PBB dan aksi melawan terorisme.

Selain dengan negara-negara tersebut, Indonesia juga terus berupaya dalam meningkatkan aktivitas diplomasi pertahanan dengan yang lainnya seperti Thailand dan Brunei yang masuk ke dalam 12 urutan mitra terdekat Indonesia dalam diplomasi pertahanan bilateral. Kedekatan hubungan pertahanan Indonesia-Thailand dapat terlihat utamanya dari patroli terkoordinasi dalam bentuk multilateral yang telah beberapa kali dilaksanakan oleh keduanya. Bahkan, hubungan pertahanan di antara keduanya menjadi semakin erat dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada bulan Mei tahun 2015 mengenai kerjasama pertahanan dalam bentuk upaya kolaboratif Indonesia-Thailand untuk menghadapi ancaman-ancaman keamanan (Festiani, 2015). Sedangkan Indonesia dan Brunei lebih banyak melakukan aktivitas diplomasi pertahanan dalam bentuk kerjasama pertahanan bilateral seperti pelatihan dan pendidikan bersama, serta menyelenggarakan operasi gabungan dan latihan bersama yang diberi nama Latihan Keris Satria antar Angkatan Darat, Latihan Helang laut antar Angkatan Laut, Latihan Elang BRUNESIA antar Angkatan Udara, dan Latihan Kilat Sakti antar Pasukan Khusus (Garrison, 2017).

Secara bilateral, aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia-Filipina juga kian diperbanyak. Utamanya, fokus kedua negara tersebut sedang menitikberatkan pada kerjasama pertahanan dalam melawan terorisme. Faktanya, Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan Indonesia saat ini tengah aktif dalam meningkatkan hubungan diplomasi pertahanannya dengan negara-negara ASEAN, tidak terkecuali dengan Laos yang notabenehnya merupakan negara dengan jumlah kolaborasi pertahanan

paling sedikit. Sehingga, Menteri Pertahanan Indonesia melakukan kunjungan ke Laos untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara dalam bidang pendidikan dan latihan militer, serta dalam ekspor-impor senjata (Aritonang, 2016).

Secara trilateral, Indonesia beberapa kali telah menyelenggarakan patroli bersama dengan Singapura dan Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka. Tujuan dari patroli bersama tersebut adalah untuk menjaga keamanan wilayah tersebut, utamanya dari ancaman pembajakan maritim. Di samping itu, Indonesia juga memiliki patroli laut bersama yang baru dibentuk pada bulan Agustus 2016 dengan Malaysia dan Filipina. Dorongan untuk patroli laut bersama dipicu oleh kasus penculikan tiga pelaut Indonesia di perairan Sabah Malaysia pada awal Juli dan kasus penculikan tujuh awak Indonesia oleh gerilyawan Filipina di perairan selatan Filipina (Sapiie, 2016).

Secara multilateral, diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara menitik beratkan kepada kerangka kerjasama ASEAN seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *East Asia Summit (EAS)*, *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)*, *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus)* dan lain sebagainya. ARF merupakan forum diskusi multilateral yang membahas isu-isu terkait perdamaian dan keamanan kawasan. Organisasi ini beranggotakan negara-negara anggota ASEAN dan sejumlah negara yang terletak di kawasan Asia Pasifik termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang juga merupakan negara mitra dialog ASEAN. Secara khusus, kesepuluh negara anggota ASEAN tersebut memegang peranan sebagai komite tetap dari organisasi kawasan ARF.

Secara garis besar, organisasi ini menjalankan diplomasi baik melalui jalur pertama maupun jalur kedua. Cakupan program kerja resmi pada jalur pertama diplomasi meliputi pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri ARF, pertemuan tahunan antar pejabat senior ARF atau *Senior Official's Meeting (SOM)*, dan *Inter-Sessional Support Group (ISG)* yang selanjutnya hasilnya akan dilaporkan pada SOM. Sedangkan pada

jalur kedua, kegiatannya mencakup seminar non resmi dan lokakarya mengenai isu keamanan regional (European Commission, 2001).

Di sisi lain, EAS adalah pertemuan tingkat tinggi antar 18 negara di kawasan Asia Pasifik yang telah berdiri sejak tahun 2005. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini dibentuk dengan tujuan untuk dialog dan kerjasama strategis guna menghadapi tantangan-tantangan politik, keamanan, dan ekonomi yang ada di kawasan. Walaupun agenda ruang lingkup dialog dan kerjasamanya luas, namun tetap saja isu pertahanan dan keamanan tidak pernah ketinggalan untuk dibahas. Pada dasarnya, keanggotaan EAS terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN, ditambah Australia, Cina, Jepang, India, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, dan Amerika Serikat. Seperti halnya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), EAS juga merupakan forum yang berpusat pada ASEAN. Sehingga walaupun terdapat delapan negara yang non ASEAN, namun EAS hanya dapat diketuai oleh negara-negara anggota ASEAN.

Lebih lanjut, ADMM merupakan langkah besar bagi ASEAN di dalam diplomasi pertahanan multilateral, karena untuk pertama kalinya dibuat kerangka kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan yang melibatkan Menteri Pertahanan langsung sebagai kunci dari pelaksanaan segala kegiatan dan agendanya. Dan untuk mengembangkan kerjasama yang melibatkan para Menteri Pertahanan tersebut, negara-negara ASEAN kemudian sepakat untuk membentuk ADMM-Plus pada tahun 2010 (Tsuruoka, 2015). Selain negara-negara anggota ASEAN, keanggotaan ADMM-Plus juga meliputi delapan negara mitra atau yang biasa disebut dengan negara "Plus" yaitu Australia, Cina, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, dan Amerika Serikat.

4.1.2 Kebijakan *Minimum Essentials Force*

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara ASEAN saat ini tengah gencar dalam melaksanakan modernisasi militer untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negaranya. Tren modernisasi militer yang sedang terjadi di kawasan Asia Tenggara dapat terlihat dari

meningkatnya anggaran pertahanan dan belanja militer masing-masing negara dengan jumlah yang cukup signifikan. Tidak terkecuali Indonesia yang memiliki keinginan untuk mencapai postur ideal TNI. Utamanya, kesadaran pemerintah bahwa kemampuan militer perlu untuk ditingkatkan, mulai muncul setelah lepasnya Indonesia dari embargo militer pada tahun 2005. Sebagai negara yang pernah terkena embargo militer, kepemilikan alutsista Indonesia dapat dinilai cukup ketinggalan dari negara-negara lainnya. Sehingga, pada tahun 2009 Indonesia mulai merencanakan program pembangunan kekuatan pertahanan, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Merujuk kepada peraturan tersebut, kemudian ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang di dalamnya berisi perencanaan pembangunan nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perencanaan ini kemudian direalisasikan melalui kebijakan *Minimum Essentials Force*. Menurut definisinya, MEF merupakan strategi pembangunan kemampuan pertahanan negara yang diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas agar mampu memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal (Kementerian Pertahanan RI, 2012). Dalam artian, pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia diselaraskan dengan anggaran pemerintah yang terbatas berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. Meskipun demikian, MEF diharapkan tetap mampu mengatasi segala bentuk ancaman, di mana utamanya ancaman non tradisional yang digolongkan sebagai ancaman nyata oleh Kementerian Pertahanan. Sehingga, ancaman-ancaman non tradisional seperti terorisme, pembajakan maritim, perdagangan manusia dan lain sebagainya, merupakan prioritas bagi pelaksanaan kebijakan MEF. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti Indonesia dapat mengesampingkan ancaman tradisional yang meskipun saat ini, kemungkinan untuk terjadi perang konvensional antar negara terhitung rendah.

Adapun tujuan dari upaya pencapaian kekuatan pokok minimum tersebut adalah untuk mendukung TNI dalam melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Secara garis besar, TNI sebagai komponen utama memang menjadi fokus bagi pelaksanaan MEF, karena pasalnya komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan pengganda tidak dapat dilihat sebagai kekuatan pokok/*essential* yang dibutuhkan pada ukuran minimum untuk menghadapi ancaman aktual, sebagaimana kekuatan MEF (Kementerian Pertahanan RI, 2012). TNI yang dimaksud meliputi ketiga satuan matra, baik darat, laut, maupun udara.

Di samping itu, sasaran lainnya dalam pelaksanaan kebijakan MEF adalah untuk menciptakan kekuatan pertahanan negara yang dapat menimbulkan efek daya gentar dan daya tangkal. Daya gentar dan daya tangkal ini penting bagi kemampuan Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman tradisional dan non tradisional dalam upaya melindungi dan mempertahankan keutuhan, keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara. Lebih lanjut, daya gentar dan daya tangkal juga sangat diperlukan agar kemampuan militer Indonesia tidak dianggap remeh oleh negara atau aktor-aktor lainnya yang ada di dalam sistem internasional. Sehingga pada level negara, dengan adanya daya gentar dan daya tangkal, tidak akan ada negara lain yang berani untuk melakukan agresi atau menyerang ke wilayah Indonesia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan *Minimum Essentials Force*, MEF terdiri dari berbagai macam unsur di antaranya adalah sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran (Kementerian Pertahanan RI, 2012). Dalam penelitian ini, fokus pembahasan terkait kebijakan MEF akan menitik beratkan kepada alutsista, industri pertahanan dan anggaran karena keterkaitan ketiga unsur tersebut kepada fenomena kecenderungan perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara. Dan terlepas dari empat strategi yang

dirumuskan Kementerian Pertahanan untuk implementasi kebijakan MEF, pengadaan alutsista akan dijadikan sebagai fokus strategi implementasi kebijakan MEF di dalam penelitian ini.

4.1.3 ASEAN Political Security Community

Rencana pembentukan sebuah komunitas keamanan di kawasan Asia Tenggara sudah ada sejak tahun 2003. Tepatnya, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas keamanan ASEAN pada pertemuan *Bali Concord II*. Dengan demikian, sudah bukan merupakan hal yang janggal bila pembahasan *ASEAN Political Security Community* selalu merujuk kepada pertemuan *Bali Concord II* tersebut sebagai titik mula perjalanan dari pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Akan tetapi, meskipun rencana pembentukannya sudah ada sejak lama, namun ide tersebut baru terealisasi ketika negara-negara anggota ASEAN mengadopsi *ASEAN Political Security Community Blue Print* pada tahun 2009 saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-14 ASEAN berlangsung di Bangkok, Thailand. Melalui pertemuan tersebut juga kemudian ditetapkan bahwa pembentukan komunitas keamanan ASEAN akan mulai dijalankan pada tahun 2015. Dan negara-negara anggota ASEAN bahkan juga telah menetapkan target pencapaian APSC itu sendiri, yakni pada tahun 2025 diharapkan visi APSC sudah mampu tercapai untuk menjadi komunitas keamanan yang bersatu, inklusif dan tangguh.

Secara garis besar, APSC memiliki karakteristik kunci sebagai berikut:

- a. Komunitas berbasis aturan, *people-oriented*, berpusat pada masyarakat yang terikat oleh prinsip-prinsip dasar, nilai dan norma bersama, di mana masyarakatnya mampu menghargai hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keadilan sosial, merangkul nilai toleransi dan moderasi, dan berbagi rasa kebersamaan yang kuat, identitas dan takdir yang sama;

- b. Komunitas yang tangguh di wilayah yang damai, aman dan stabil, dengan kapasitas yang ditingkatkan untuk merespons secara efektif dan tepat waktu terhadap tantangan demi kepentingan bersama ASEAN, sesuai dengan prinsip keamanan komprehensif;
- c. Komunitas *outward-looking* yang memperdalam kerja sama dengan pihak eksternal, menjunjung tinggi dan memperkuat sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang berkembang, dan memainkan peran yang bertanggung jawab dan konstruktif secara global berdasarkan *platform* bersama ASEAN yang terkait dengan isu-isu internasional; dan
- d. Komunitas dengan kapasitas kelembagaan yang diperkuat melalui proses kerja dan koordinasi ASEAN yang ditingkatkan, efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan semua Organ ASEAN yang juga ditingkatkan termasuk penguatan ASEAN Secretariat, serta dengan meningkatnya kehadiran kelembagaan ASEAN di tingkat nasional, regional dan internasional (ASEAN, 2016).

Di dalam *ASEAN Political Security Community Blue Print* tersebut sudah cukup digambarkan bahwa pembentukan komunitas keamanan ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan stabilisasi kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut, di dalam dokumen resmi Deklarasi Bersama Menteri Pertahanan ASEAN untuk Memperkuat Kerjasama Pertahanan yang dibuat pada tahun 2011 juga dijelaskan bahwa tujuan utama dari *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah untuk membangun kawasan yang kohesif, damai, aman dan stabil dengan berdasar kepada tanggung jawab bersama, serta untuk menciptakan kawasan yang dinamis dan berkemampuan *outward-looking* di dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung (ASEAN, 2011). Menurut definisinya, yang dimaksud dengan Asia Tenggara yang damai dan stabil adalah kondisi di mana setiap negara dapat berdamai dengan dirinya sendiri dan dapat menyingkirkan segala bentuk penyebab konflik melalui penghormatan terhadap keadilan dan peraturan hukum serta penguatan ketahanan nasional dan kawasan (Tomotoka, 2008).

Dalam membangun kawasan yang damai, aman dan stabil, ASEAN mengadopsi pendekatan komprehensif terhadap keamanan yang meningkatkan kapasitas negara-negaranya untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang ada dan yang akan datang, menyelesaikan perbedaan dan perselisihan dengan cara-cara damai, memastikan bahwa kawasan Asia Tenggara tetap bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta meningkatkan keamanan dan kerja sama maritim (ASEAN Secretariat, 2016). Adapun cakupan kerja yang akan dilakukan negara-negara ASEAN untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut adalah dengan memperkuat mekanisme kerjasama pertahanan yang ada di bawah payung APSC, seperti ADMM dan ADMM-Plus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan negara-negara anggota ASEAN di dalam dialog strategis mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan serta kerjasama praktis, sekaligus meningkatkan sentralitas ASEAN dalam proses pelaksanaan kegiatan ADMM-Plus. Di samping itu, negara-negara ASEAN harus mampu menanggapi isu mendesak atau situasi krisis yang mempengaruhi ASEAN secara efektif dan tepat waktu.

Lebih lanjut, cakupan kerja ASEAN juga meliputi upaya peningkatan kapasitas negara-negara anggota dan secara keseluruhan agar mampu menangani isu keamanan non tradisional secara efektif dan tepat waktu. Berdasarkan data yang tercantum di dalam dokumen *APSC Blue Print* yang diterbitkan pada tahun 2016, dijelaskan bahwa dalam rangka menangani isu-isu keamanan non tradisional di kawasan, kegiatan pelaksanaan APSC akan meliputi hal-hal berikut:

- a. Memperkuat kerja sama dalam menangani dan memberantas kejahatan transnasional.
- b. Terus meningkatkan kerja sama melawan terorisme.
- c. Mengejar aspirasi ASEAN Bebas Narkoba.
- d. Meningkatkan kerjasama dalam melawan perdagangan dan penyelundupan manusia.
- e. Bekerja menuju penghapusan kasus penyelundupan senjata kecil dan senjata ringan.

- f. Memperkuat kerjasama dalam memerangi kejahatan siber.
- g. Memperkuat kerjasama pengelolaan perbatasan.
- h. Memperkuat kerjasama ASEAN dalam penanganan bencana dan tanggap darurat.
- i. Meningkatkan kapasitas ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas.

Menyelesaikan perbedaan dan perselisihan dengan cara-cara damai merupakan salah satu tujuan APSC yang sudah ASEAN wujudkan bahkan sejak organisasi tersebut berdiri di tahun 1967 (V. Bob Sugeng Hadiwinata, komunikasi personal, 21 November 2017). Pasalnya, sejak ASEAN terbentuk, negara-negara anggotanya tidak pernah ada yang terlibat di dalam konflik militer satu sama lain. Dan jika ada ketegangan hubungan di antara negara-negara ASEAN, organisasi kawasan tersebut selalu mengedepankan diplomasi sebagai upaya resolusi konflik, seperti halnya yang pernah terjadi pada konflik Kamboja-Thailand. Namun, dalam menghadapi tantangan di masa depan, ASEAN perlu memastikan bahwa penggunaan cara-cara damai masih menjadi satu-satunya pilihan dalam upaya resolusi konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengedepankan *Confidence Building Measures* (CBM) dan mengembangkan kegiatan diplomasi preventif.
- b. Mengedepankan transparansi dan pemahaman yang lebih besar mengenai kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan antar negara.
- c. Mengedepankan partisipasi aktif negara-negara anggota ASEAN dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan paska konflik, sesuai dengan kapasitas masing-masing negara anggota ASEAN.
- d. Mengedepankan dan memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian, dan lain sebagainya (ASEAN Secretariat, 2016).

Selain mempertahankan prestasinya sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, tujuan lainnya yang ingin dicapai ASEAN melalui APSC adalah untuk meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim. Upaya pencapaian

tujuan APSC tersebut dilaksanakan melalui penguatan mekanisme kerjasama maritim ASEAN dan penerapan konvensi dan prinsip maritim yang sudah diterima secara internasional (ASEAN Secretariat, 2016). Adapun agenda yang akan menjadi fokus pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim adalah sebagai berikut:

- a. Mertahankan Laut Cina Selatan sebagai lautan yang damai, makmur, dan ramai oleh aktifitas-aktifitas yang bersifat kooperatif.
- b. Mengedepankan kerjasama maritim untuk menangani masalah maritim secara komprehensif.
- c. Memastikan navigasi internasional yang damai, aman, bebas dan tanpa hambatan, sesuai dengan hukum internasional yang relevan.

Lebih khususnya, APSC dibentuk sebagai wadah untuk memperdalam dan memperluas kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang politik dan keamanan serta untuk memperkuat kapasitas ASEAN dalam menanggapi ancaman kawasan dan internasional. Penguatan kerjasama dan kapasitas ASEAN tersebut penting guna mewujudkan visi APSC yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025 sebagai komunitas keamanan yang bersatu, inklusif dan tangguh. Lebih jauh lagi, ASEAN harus tetap bersikap kohesif, responsif dan relevan dalam menghadapi tantangan terhadap perdamaian dan keamanan kawasan serta berperan sentral dalam membentuk arsitektur kawasan yang berkembang (ASEAN Secretariat, 2017).

4.2 Analisis Data

Dalam subbab analisis data, sebagian besar analisis yang ditulis, diambil dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dari *stakeholders* terkait. Namun, tidak sepenuhnya berupa data primer, subbab ini juga didukung dengan beberapa data sekunder yang didapatkan melalui berbagai literatur dan dokumen pendukung.

4.2.1 Peran Indonesia di ASEAN

Sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967, Indonesia memang sudah menjadi aktor dominan pada setiap kegiatan dan pengambilan keputusan hingga akhirnya organisasi regional tersebut kian berkembang dan bahkan dianggap menjadi salah satu yang paling sukses dibandingkan dengan institusi lainnya yang ada di dalam politik internasional. Bahkan, menurut Ingan Malem (2017), Indonesia sudah dianggap sebagai pemimpin di ASEAN. Faktanya, pendapat atau usulan Indonesia selalu paling ditunggu-tunggu oleh negara-negara lainnya pada setiap rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di bawah kerangka kerjasama pertahanan ASEAN. Utamanya, pendapat Indonesia selalu ditunggu-tunggu dalam hal merespon ancaman-ancaman keamanan yang bersifat mendesak di kawasan Asia Tenggara ataupun dalam hal mencegah konflik yang mungkin terjadi di antara negara-negara anggotanya.

Merujuk pada Yoedhi Swastanto (2017), diakui atau tidak, Indonesia memiliki peran penting dan strategis di kawasan Asia Tenggara. Peran strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara dapat dilihat dari 4 sisi. Pertama, Indonesia merupakan negara Non Blok. Sehingga, dalam menghadapi kondisi seperti persaingan kekuasaan di antara negara-negara *great powers*, Indonesia dapat memainkan perannya lebih banyak dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara karena ketidakberpihakannya terhadap negara manapun. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan jumlah kekuatan yang paling besar di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut utamanya dapat dilihat dari jumlah personil militernya. Faktanya, kekuatan pertahanan Indonesia didukung oleh 476.000 personil militer aktif, dan juga didukung oleh 400.000 cadangan aktif (Aco, 2017). Ketiga, Indonesia berada di wilayah yang strategis. Dilihat dari geostrategi, tentunya posisi geografis Indonesia tersebut dapat membuka banyak peluang bagi Indonesia. Selain Indonesia diapit oleh dua benua, negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara ini juga memiliki kedekatan wilayah dengan perairan Laut Cina Selatan yang

sedang menjadi topik hangat di dalam politik internasional karena tengah dipersengketakan oleh Cina, Taiwan, dan empat negara anggota ASEAN lainnya. Keempat, Indonesia merupakan negara pendiri ASEAN. Ide mengenai pembentukan ASEAN tersebut kemudian disambut baik oleh Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Dan bahkan hingga saat ini, kepemimpinan Indonesia di ASEAN masih sangat jelas terlihat.

Lebih lanjut, Yoedhi Swastanto (2017) juga menjelaskan bahwa peran Indonesia di ASEAN sangat signifikan, bahkan seringkali dijadikan sebagai acuan oleh negara-negara lain. Dalam artian, negara-negara anggota ASEAN lainnya mengikuti segala keputusan yang ingin diambil oleh Indonesia dalam konteks regional. Sebagai contohnya, Menteri Pertahanan Indonesia beberapa kali berinisiatif untuk mengangkat isu-isu keamanan dan pertahanan di forum dialog seperti ADMM dan ADMM-Plus, dan ide-ide tersebut selalu direspon positif oleh negara-negara anggota lainnya.

Selain Menteri Pertahanan yang mewakili instansi Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri juga selalu memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi inisiator dalam hal mengatasi isu-isu keamanan dan pencegahan konflik, terutama jika terjadi *deadlock* di antara negara-negara ASEAN (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). Hal tersebut tentunya juga disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan pedoman bagi Indonesia dalam memainkan perannya di kawasan. Berdasarkan pedomannya tersebut, Indonesia memang dengan tegas menyatakan Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Salah satu bentuk inisiatif Indonesia di ASEAN untuk mengatasi isu-isu keamanan non tradisional seperti terorisme dapat tergambar ketika Menteri Pertahanan mengusulkan kerjasama pertahanan trilateral dalam bentuk patroli bersama antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Selain ketiga negara tersebut, Brunei dan Singapura juga turut terlibat dalam kerjasama pertahanan ini sebagai negara pengamat. Kerjasama pertahanan yang

diusulkan oleh Indonesia ini melibatkan keterlibatan aktif dari matra laut dan matra udara dari instansi militer masing-masing negara. Kerjasama yang lebih dikenal dengan nama INDOMALPHI ini utamanya ditujukan untuk merespon isu terorisme yang terjadi di Marawi, Filipina. Usulan Indonesia untuk membentuk INDOMALPHI diterima dengan baik hingga akhirnya pada bulan Juni 2017 operasi gabungan ketiga negara mulai diluncurkan. Selain oleh negara-negara ASEAN, usulan Indonesia ini juga direspon positif oleh negara-negara lain di luar kawasan seperti Rusia, Cina dan Amerika Serikat yang berjanji akan membantu keberlangsungan kerjasama pertahanan ini.

Selanjutnya, Ingan Malem (2017) juga menambahkan bahwa sebagai bentuk tindak lanjut dari kerjasama pertahanan di antara Malaysia, Filipina dan Indonesia tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia mengusulkan pembentukan kerjasama pertahanan baru yang berfokus terhadap informasi intelijen yang dinamakan *Our Eyes initiative* (OEI). Tujuannya adalah untuk merespon isu keamanan terkait terorisme dan radikalisme yang bersifat transnasional. Secara lebih spesifik, Menteri Pertahanan Indonesia menjelaskan bahwa pendirian organisasi yang bergerak di bidang informasi intelijen ini ditujukan untuk mencegah aksi terorisme seperti yang di Marawi agar tidak terjadi lagi di negara-negara ASEAN, serta untuk mencegah Asia Tenggara dalam menjadi kawasan Timur Tengah selanjutnya.

Lebih lanjut, Ingan Malem (2017) menambahkan bahwa OEI beranggotakan enam negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand dan Singapura. Pada tanggal 25 Januari 2018, negara ASEAN telah mengadakan pertemuan di Filipina untuk lebih banyak membicarakan terkait pembentukan OEI dan juga untuk mengumumkan secara resmi pendirian organisasi ASEAN berbasis intelijen tersebut. Dan peranan Indonesia dalam pertemuan tersebut juga cukup sentral. Bahkan, Ryamizard selaku Menteri Pertahanan Indonesia saat ini juga mengusulkan untuk mengadakan pertemuan OEI setiap dua minggu untuk bertukar informasi mengenai kelompok militan dan mengembangkan

database umum terkait kelompok ekstrimis yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan aksinya.

Di sisi lain, Indonesia juga kerap kali memanfaatkan peran sentralnya di ASEAN bagi pencegahan konflik di antara negara-negara ASEAN maupun negara lainnya di luar kawasan. Bahkan, Ingan Malem (2017) menjelaskan bahwa Indonesia telah beberapa kali menjadi *peace broker* ataupun menjadi mediator dalam perundingan untuk mengurangi ketegangan konflik baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Di dalam kawasan, Indonesia merupakan negara yang menginisiasikan pertemuan darurat negara-negara ASEAN bagi pencegahan konflik di antara Kamboja dan Thailand ketika keduanya sedang mempersengketakan Candi Preah Vihear.

Terkait dengan negara di luar kawasan, Yoedhi Swastanto (2017) menjelaskan bahwa Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara yang situasi keamanannya sedang dihiasi oleh persaingan antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Utamanya, peran tersebut dapat sangat tergambar di dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan melalui ASEAN. Merujuk pada Yoedhi Swastanto (2017), Menteri Pertahanan Indonesia adalah pejabat negara ASEAN yang menginisiasikan untuk membangun kerjasama dengan Cina. Faktanya, sebelum tahun 2015, Cina tidak mau berkomunikasi dengan negara-negara ASEAN terkait dengan masalah Laut Cina Selatan. Pada pertemuan Shangri-La Dialogue 2015, Menteri Pertahanan Republik Indonesia menyarankan untuk mengelola wilayah Laut Cina Selatan secara bersama untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Misi tersebut direalisasikan dalam bentuk latihan militer gabungan untuk bantuan kemanusiaan yang kemudian akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018.

Lebih lanjut, Ingan Malem (2017) menambahkan bahwa Indonesia juga merupakan negara yang menginisiasikan dibentuknya *Code of Conduct* (COC) untuk wilayah Laut Cina Selatan pada pertemuan di Guilin. Hingga akhirnya pada tahun 2017, usulan pembentukan COC

tersebut disahkan pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-Cina di Manila. Pengesahan pembentukan COC tersebut merupakan bentuk suatu terobosan bagi upaya menjaga stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan yang secara geografis sangat berdekatan dan bahkan berada di wilayah kawasan Asia Tenggara. Kerangka kerja COC nantinya akan dapat digunakan untuk merealisasikan COC yang sudah lama dicanangkan oleh ASEAN.

Di samping itu, peran sentral Indonesia lainnya yang diwujudkan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan adalah dengan melibatkan dua kekuatan besar ke dalam beberapa wadah diplomasi pertahanan yang ada di ASEAN seperti *Asean Regional Forum (ARF)*, *East Asia Summit (EAS)*, dan *ADMM-Plus*. Faktanya, keterlibatan Amerika Serikat di EAS juga tidak lepas dari peran penting Indonesia yang menginisiasikan hal tersebut meskipun Cina beberapa kali telah menolaknya. Bahkan, pada pertemuan pertama EAS yang menghadirkan Amerika Serikat sebagai negara anggota baru, Indonesia menjadi tuan rumahnya.

Merujuk pada Idiil Syawfi (2017), selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memang telah berupaya dalam meningkatkan profil internasionalnya dan juga mendorong ASEAN untuk memainkan peran global yang lebih besar. Indonesia sangat aktif untuk terlibat dalam setiap kegiatan dan isu-isu terkait keamanan yang terjadi di dalam politik internasional. Bahkan, Idiil Syawfi (2017) juga menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono telah meningkatkan 'investasi' Indonesia dalam hal keaktifan dan *image* atau citra baik secara internasional. Namun pada pemerintahan Jokowi hal tersebut sedikit berubah, di mana Presiden Republik Indonesia saat ini berusaha untuk menuangkan 'investasi' yang sudah Indonesia punya tersebut untuk membantu pencapaian kepentingan nasional. Sebagai contohnya dalam masalah Laut Cina Selatan, Indonesia masih memegang peran sentral dan tetap menjadi *honest broker* tetapi menekankan posisinya sebagai *non claimant state*.

4.2.2 Kegiatan Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Implementasi Kebijakan *Minimum Essentials Force*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang kebijakan *Minimum Essentials Force*, ditetapkan bahwa terdapat enam unsur program pembangunan postur pertahanan Indonesia yang terdiri dari sumber daya manusia, materiil/alutsista TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran (Kementerian Pertahanan, 2012). Akan tetapi untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan, penelitian ini akan difokuskan pada tiga unsur saja yaitu materiil/alutsista TNI, industri pertahanan dan anggaran. Sehingga, implementasi kebijakan MEF akan dibahas berdasarkan ketiga unsur tersebut yang kemudian dikaitkan dengan kerjasama pertahanan.

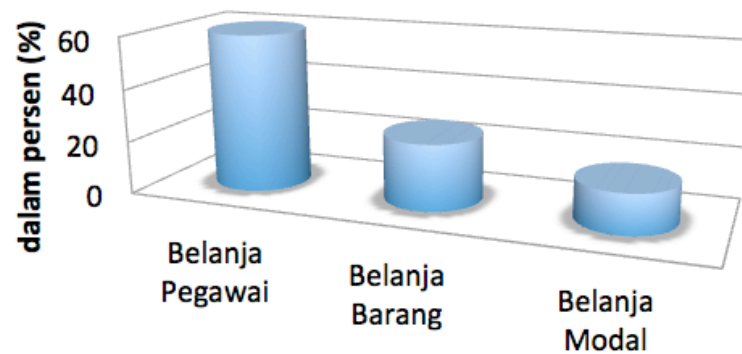
4.2.2.1 Kebutuhan Alutsista untuk Mendukung Pencapaian *Minimum Essentials Force*

Alutsista merupakan salah satu unsur penting dari kebijakan MEF. Untuk dapat memiliki alutsista yang mencukupi dan mendukung kinerja TNI dalam melaksanakan OMP dan OMSP dengan baik, Kementerian Pertahanan kemudian merumuskan strategi pengadaan. Dalam prakteknya, pengadaan alutsista diutamakan berasal dari industri dalam negeri ketimbang industri luar negeri, baik dalam bentuk pembelian ataupun kolaborasi industri pertahanan. Akan tetapi, unsur alutsista tentunya tidak dapat dilepaskan dari unsur anggaran, karena pasalnya pengadaan memerlukan dana yang utamanya bersumber dari anggaran pertahanan.

Merujuk pada Sugeng (2017), mengingat pembangunan postur pertahanan Indonesia masih terbatas kepada pencapaian kekuatan pokok minimum, maka anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan alutsista juga terbatas. Faktanya, pada awal perumusannya, alokasi anggaran pertahanan untuk pengadaan alutsista yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan untuk

diimplementasikan dalam pelaksanaan MEF juga terhitung sedikit. Berdasarkan persentasenya, anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan alutsista dalam belanja modal pada Rencana Strategis tahap I hanya sebesar 15-25% dari jumlah total anggaran pertahanan. Dan untuk perbaikan dan pemeliharaan alutsista yang sudah ada, Kementerian Pertahanan menyediakan sebesar 25% dari total anggaran pertahanan. Sedangkan alokasi anggaran pertahanan terbesar yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan ditujukan untuk memenuhi anggaran pegawai, adalah sebesar 50-60%. Namun diharapkan seiring dengan meningkatnya anggaran pertahanan dari tahun ke tahun yang juga disesuaikan dengan rencana implementasi kebijakan MEF, alokasi anggaran pertahanan untuk pengadaan alutsista dapat meningkat juga utamanya pada Rencana Strategis tahap II dan III. Adapun grafik yang dapat menggambarkan alokasi anggaran alutsista terhadap anggaran pertahanan dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Persentase Anggaran Pertahanan



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
■ Persentase Anggaran Pertahanan	60	25	15

Gambar 4.1 Grafik Persentase Anggaran Pertahanan Indonesia

(Sumber: Kementerian Pertahanan, 2012)

Lebih lanjut, Sugeng (2017) menambahkan bahwa pengadaan alutsista yang direncanakan dan diimplementasikan melalui kebijakan MEF ditujukan bagi tiga instansi militer sebagai komponen utama, yaitu

TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Adapun dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) dijelaskan secara khusus mengenai jenis-jenis alutsista yang masuk ke dalam rencana pengadaan untuk mendukung pencapaian program MEF, yakni sebagai berikut:

- a. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Darat meliputi senjata, kendaraan tempur, panser yonif mekanis, ranpur kavaleri, kendaraan taktis, kendaraan administrasi, kendaraan khusus, alat angkut air, perbekalan udara, pesawat terbang, materiil zeni, alat perhubungan, material khusus intel, munisi, optik, alat optik, materiil komando pasukan khusus, dan alat kesehatan serta rematerialisasi berbagai satuan.
- b. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Laut meliputi Kapal Republik Indonesia, Pesawat udara, Ranpur Marinir, Peralatan Laut Khusus, Material Perbekalan dan Material Khusus. Selain itu, dilaksanakan penghapusan KRI, Pesud, dan Ranpur yang secara operasional sudah tidak efektif.
- c. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Udara pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat VIP/VVIP, pesawatintai, pesawat helikopter, pesawat latihan, Pesawat Terbang Tanpa Awak, Satuan Radar, Satuan Tembak Peluru Kendali jarak sedang, dan Baterai Penangkis Serangan Udara jarak pendek (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

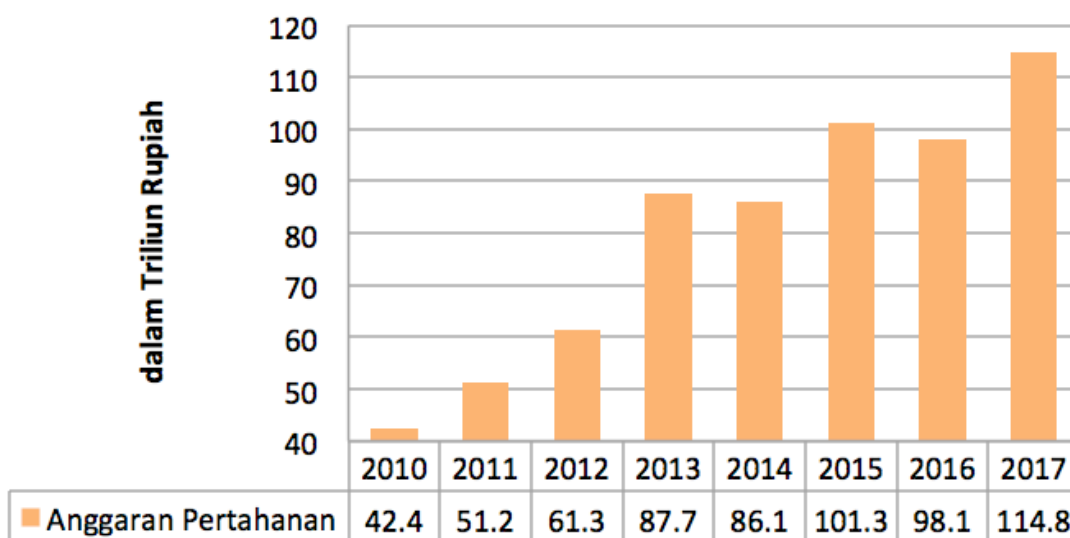
4.2.2.2 Implementasi Kebijakan *Minimum Essentials Force*

Mengingat unsur alutsista menjadi fokus di dalam penelitian ini, maka implementasi kebijakan MEF akan dilihat berdasarkan pengadaan alutsista yang telah dilakukan sejak MEF mulai dilaksanakan pada tahun 2010 hingga tahun 2017. Dan tentunya, unsur anggaran pertahanan juga menjadi kunci bagi pelaksanaan strategi pengadaan tersebut. Sejak MEF resmi dijalankan pada tahun 2010, anggaran pertahanan Indonesia terus mengalami peningkatan hampir pada setiap tahunnya.

Merujuk pada Kementerian Keuangan RI (2017) yang menerbitkan dokumen Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK APBN) Tahun Anggaran 2017, Indonesia memulai program MEF di tahun 2010 dengan menetapkan anggaran pertahanan untuk belanja militer sebesar Rp. 42,4 triliun. Anggaran tersebut tentunya ternilai cukup kecil apabila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia yang besar, yakni mencakup dari Sabang hingga Merauke. Dengan adanya kebijakan MEF, Indonesia terus meningkatkan alokasi anggaran APBN untuk Kementerian Pertahanan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 jumlahnya mencapai lebih dari dua kali lipat anggaran pertahanan 2010, yaitu sebesar Rp. 87,7 triliun. Namun pada tahun 2014 jumlah anggaran pertahanan Indonesia terpaksa harus turun ke angka Rp. 86,1 triliun karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dunia.

Pada tahun 2015, anggaran pertahanan Indonesia kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu hingga mencapai angka Rp. 101,3 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2017). Namun sayangnya, pemerintah harus mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan lagi pada tahun 2016 karena kondisi keuangan global yang memburuk dan memberi dampak kepada perekonomian Indonesia dalam bentuk kecilnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Penurunan tersebut berjumlah Rp. 3,2 triliun, sehingga anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2016 berada pada angka Rp. 98,1 triliun. Di sisi lain, anggaran pertahanan Indonesia berada pada angka yang tertinggi di tahun 2017, yakni sebesar Rp. 114,8 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi untuk menyukseskan program kebijakan MEF. Adapun grafik yang dapat memvisualisasikan anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2010-2017 tergambar pada Gambar 4.2.

Anggaran Pertahanan Indonesia Tahun 2010-2017 (dalam Triliun Rupiah)



Gambar 4.2 Grafik Anggaran Pertahanan Indonesia Tahun 2010-2017

(Sumber: Kementerian Keuangan, 2017)

Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk realisasi anggaran pertahanan, Indonesia melakukan pengadaan alutsista bagi seluruh matra TNI. Merujuk pada Lili Wahyu Sugiarto (2018), pada Rencana Strategis tahap I, Indonesia setidaknya sudah melakukan pengadaan delapan jenis alutsista dalam jumlah besar. Pengadaan tersebut dilakukan dengan melakukan kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain di luar kawasan, baik dalam bentuk pembelian maupun produksi bersama. Negara-negara yang melakukan kerjasama pertahanan dengan Indonesia untuk mendukung implementasi MEF meliputi Brazil, Perancis, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.

Adapun alutsista yang diakuisisi oleh Indonesia melalui Rencana Strategis tahap I di antaranya adalah *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) ASTROS MK II yang dibeli dari Brasil dan sudah sampai dan disebarkan pada tahun 2015 (Lili Wahyu Sugiarto, komunikasi personal, 29 Januari 2018). Di samping itu, Indonesia juga melakukan pembelian rudal super cepat (*high velocity missile*) dari Inggris dan rudal jarak dekat

dengan jenis Mistral Atlas dari Perancis yang di mana keduanya diharapkan akan tuntas pada tahun 2018. Akuisisi Meriam Caesar 155mm yang dibeli dari Perancis juga telah memperkuat kekuatan pertahanan darat Indonesia sejak tahun 2016. Selain rudal dan meriam, pengadaan alutsista bagi TNI Angkatan Darat yang sempat mencuri perhatian publik adalah *Main Battle Tank* (MBT) Leopard yang telah tuntas pada tahun 2017.

Lili Wahyu Sugiarto (2018) juga menambahkan bahwa kekuatan pertahanan TNI Angkatan Darat telah diperkuat dengan hadirnya sejumlah 12 unit Heli Serbu ringan dengan jenis Fennec tipe AS550 yang diproduksi oleh Dirgantara Indonesia yang juga bekerjasama dengan *Airbus Helicopters* milik Perancis. Selain itu, Indonesia juga telah membuat kontrak dengan Dirgantara Indonesia terkait pembelian 12 unit Heli Serang jenis Fennec tipe AS555AP yang diproduksi bersama dengan *Airbus Helicopters* juga. Hal tersebut didasarkan kepada komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia dengan tetap membeli produk alutsista dari dalam negeri. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan helikopter tempur, Indonesia membelinya dari Amerika Serikat dengan jenis Apache dengan kontrak sebanyak delapan unit yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2018. Adapun data mengenai pengadaan alutsista untuk TNI Angkatan Darat dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pengadaan Alutsista untuk TNI Angkatan Darat sesuai Rencana Stragegis Tahap I

Jenis	Jumlah	Tahun Selesai	Produksi
MLRS ASTROS MK2	36 Launcher (2 batalyon)	2015	Brasil
Meriam Caesar 155mm	18 unit (2 batalyon)	2016	Perancis
Heli Serbu Fennec	12 unit	2016	Indonesia

AS550			dan Perancis
MBT Leopard	61 unit	2017	Jerman
Heli Serang Fennec AS555AP	12 unit	2018	Indonesia dan Perancis
Heli Tempur Apache	8 unit	2018	Amerika Serikat
Rudal super cepat (high velocity missile)	5 baterai	2018	Inggris
Rudal Mistral Atlas	27 unit	2018	Perancis

(Sumber: Lili Wahyu Sugiarto, komunikasi personal, 29 Januari 2018)

Sedangkan pada Rencana Strategis tahap II, Indonesia setidaknya membeli enam jenis alutsista dalam jumlah yang besar sebagai bentuk implementasi kebijakan MEF (Lili Wahyu Sugiarto, komunikasi personal, 29 Januari 2018). Di antaranya adalah pemesanan tambahan MLRS ASTROS sebanyak dua batalyon dan rudal super cepat sebanyak empat baterai yang diharapkan tuntas pada tahun 2020. Indonesia juga kembali memesan Meriam Caesar 155mm sebanyak satu batalyon yang diharapkan sampai dan dapat digunakan seluruhnya pada tahun 2019. Di samping itu, pemerintah juga melakukan pembelian tambahan untuk Heli Serbu sebanyak kurang lebih satu skuadron yang juga diharapkan sampai pada tahun 2020. Ditambah, Lili Wahyu Sugiarto (2018) juga turut menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan negosiasi untuk pemesanan Heli Angkut Berat dan Sedang, serta pengadaan untuk ranpur Infanteri dan Kaveleri.

Di sisi lain, berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) (2016), TNI Angkatan Laut telah melakukan pengadaan setidaknya enam jenis alutsista sebagai bentuk implementasi MEF yang sesuai dengan Rencana Strategis tahap I. Di antaranya adalah Rudal Yakhont yang dibeli dari Rusia pada tahun 2009 sebanyak sekitar 10 unit. Rudal yang merupakan rudal anti kapal

tersebut telah tuntas dan sampai di Indonesia pada tahun 2011. Selain itu, TNI Angkatan Laut membeli kapal dari dalam negeri yang diproduksi oleh PT PAL dengan jenis KCR60 sebanyak tiga unit yang telah diakuisisi hingga tahun 2017. Namun, jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat PT. PAL tengah melakukan pembangunan kapal KCR60 lagi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan TNI AL. Dan nantinya, kapal tersebut akan dikombinasikan dengan penggunaan rudal anti kapal dengan jenis C-705 yang diproduksi oleh Cina. Rudal C-705 tersebut sudah dipesan oleh Indonesia sejak tahun 2011 sebanyak 250 unit. Lebih lanjut, TNI Angkatan Laut juga telah melakukan pembelian kapal yang diproduksi secara bersama oleh PT PAL dan perusahaan milik Belanda yang bernama *Damen Schelde Naval Shipbuilding* (DSNS) dengan jenis Sigma 10514 Perusak Kawak Rudal (PKR) yang telah sampai sebanyak dua unit pada tahun 2016 dan 2017.

Indonesia juga telah memesan tiga unit kapal selam dengan jenis *Chang Bogo Class* dari Korea Selatan pada tahun 2011, di mana kapal pertama sudah sampai di Indonesia pada tahun 2017 (*Stockholm International Peace Research Institute, 2016*). Akan tetapi, dengan adanya *Transfer of Technology* (ToT), pembangunan ketiga jenis kapal selam tersebut akan dibangun di Indonesia oleh PT PAL. Selain Rusia, Cina, Belanda dan Korea Selatan, pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama pertahanan dengan Inggris dalam bentuk pembelian tiga korvet *Nakhoda Ragam Class* yang telah tiba pada tahun 2014.

Lebih lanjut, pada Rencana Strategis tahap II, Indonesia melakukan akuisisi alutsista dalam bentuk kapal dan helikopter. Menurut data yang dipublikasikan oleh SIPRI (2016), Indonesia telah memesan empat tambahan kapal Sigma 10514 PKR pada tahun 2015 yang selanjutnya akan diproduksi di Indonesia oleh PT PAL. Di samping itu, Indonesia juga telah melakukan pesanan kembali kapal dengan jenis KCR60 yang dibuat oleh PT PAL. Selain pembelian ulang kapal-kapal, Indonesia juga sedang melangsungkan negosiasi dengan Rusia terkait pembelian kapal selam Kilo. Dan untuk melengkapinya, TNI Angkatan

Laut juga bahkan telah memesan kapal *Landing Platform Deck* (LPD) kepada PT PAL pada tahun 2017 sejumlah satu unit untuk menambah jumlah yang dimilikinya menjadi tiga unit. Bahkan, untuk kian memperkuat kekuatan pertahanan laut, pemerintah Indonesia juga telah memesan *Anti-Submarine Warfare* (ASW) Panther dengan tipe AS565 MBe yang diproduksi secara bersama oleh Dirgantara Indonesia dan *Airbus Helicopters* milik Perancis. Jumlah yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut adalah sebanyak 11 unit, di mana tiga di antaranya telah sampai pada tahun 2016.

Pada Rencana Strategis tahap I, pemerintah Indonesia sudah menghabiskan cukup banyak anggaran bagi pengadaan alutsista bagi TNI Angkatan Udara. Anggaran pertahanan Indonesia salah satunya digunakan untuk membeli enam pesawat tempur jenis Sukhoi dengan tipe Su-30 MK sebanyak enam unit yang telah tuntas pada tahun 2013 (Stockholm International Peace Research Institute, 2016). Dan untuk mengganti armada Bronco, TNI Angkatan Udara juga telah melakukan pembelian pesawat Super Tucano dengan tipe EMB-314 dari Brasil sejumlah delapan unit pada tahun 2011 dan delapan unit lagi di tahun 2012. Keseluruhan pesawat untuk tempur taktis *close air support*,intai dan serangan anti-gerilya tersebut sudah sampai di Indonesia secara bertahap pada tahun 2012-2016.

Selain dari Rusia, Indonesia juga menyeimbangkan secara politis dengan menerima hibahan pesawat tempur F-16 bekas dari Amerika Serikat sejumlah 24 unit yang telah tuntas pada akhir tahun 2017. Dan pada tahun 2011, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani kontrak dengan Korea Selatan untuk pembelian pesawat latih dengan jenis T-50 Golden Angle sejumlah 16 unit. Keseluruhan pesawat tersebut kemudian telah sampai dan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara di tahun 2014. Indonesia juga bahkan sedang melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan untuk membangun jet tempur KFX/IFX yang kontrak awalnya telah ditandatangani pada tahun 2010. Lebih lanjut, Indonesia juga bahkan membangun kerjasama pertahanan dengan Israel

dalam bentuk pembelian UAV Heron untuk pengawasan sebanyak empat unit pada tahun 2006 dan telah tuntas pada tahun 2012.

Dibandingkan dengan tahap sebelumnya, TNI Angkatan Udara melakukan pembelian alutsista yang lebih sedikit pada Rencana Strategis tahap II. Merujuk pada dokumen SIPRI (2016), Indonesia melakukan pembelian *Beyond Visual Range Air-to-Air Missile* (BVRAAM) dari Perancis pada tahun 2016 sebanyak kurang lebih 40 unit. Selain Perancis, pemerintah juga tertarik pada rudal udara-ke-udara dari Ukraina dengan jenis R-27 untuk melengkapi persenjataan pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang telah dimiliki Indonesia. Dan untuk kian memperkuat armada tempur TNI Angkatan Udara, pemerintah Indonesia juga telah menyetujui pembelian Sukhoi Su-35 sebanyak 11 unit pada tahun 2017.

4.2.2.3 Implementasi Kebijakan *Minimum Essentials Force* melalui Kerjasama Pertahanan dengan Negara-Negara ASEAN

Hampir seluruh negara anggota ASEAN memiliki industri pertahanan, terkecuali Laos, Kamboja dan Brunei. Sehingga ketujuh negara ASEAN (termasuk Indonesia) memiliki industri pertahanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengurangi impor senjata, serta untuk melakukan ekspor senjata ke negara lain. Meskipun banyak negara ASEAN yang memiliki industri pertahanan, namun faktanya hingga saat ini Indonesia tidak pernah membeli alutsista dari salah satunya (Lili Wahyu Sugiarto, komunikasi personal, 29 Januari 2018). Dalam artian, kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam wujud pembelian alutsista sebagai bentuk implementasi kebijakan MEF tidak ada sama sekali.

Alasan terbesar Indonesia tidak pernah membeli alutsista dari negara-negara ASEAN adalah kurang berkembangnya industri pertahanan. Dengan demikian, Indonesia lebih memilih untuk membeli alutsista dari negara-negara di luar kawasan yang sudah jauh lebih maju industri pertahanannya seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Jerman, Korea Selatan, Cina, dan lain-lain. Pasalnya, kebanyakan dari industri

pertahanan negara-negara ASEAN memang belum mampu berkembang sebaik negara-negara tersebut. Adapun negara-negara yang dianggap sudah memiliki industri pertahanan yang cukup maju di kawasan Asia Tenggara hanya terbatas pada Singapura dan Indonesia (Raghavan, 2011).

Meskipun implementasi kebijakan MEF melalui kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN tidak dapat dielaborasi melalui unsur alutsista, namun unsur industri pertahanan ternyata mampu menggambarkan hal tersebut. Menurut Kementerian Pertahanan (2012), pembinaan industri pertahanan memang telah menjadi fokus pelaksanaan MEF sejak tahun 2010. Selain untuk memenuhi kebutuhan TNI, pembinaan industri pertahanan juga ditujukan untuk mendorong ekspor alutsista ke negara-negara lain. Dan sebagai permulaan, negara-negara ASEAN tentunya dapat dijadikan pasar bagi penjualan alutsista yang diproduksi industri pertahanan Indonesia sebelum nantinya dapat semakin meluas secara global.

Faktanya, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara pemasok alutsista bagi negara-negara ASEAN. Bahkan, alutsista buatan Indonesia memang cukup digemari oleh negara-negara tetangganya. Karya industri pertahanan Indonesia yang digemari adalah seperti pesawat, kapal perang, dan senjata. Adapun negara-negara ASEAN yang menjadi konsumen dari industri pertahanan Indonesia adalah Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Dan kebanyakan dari mereka telah melakukan pembelian alutsista dari Indonesia sebanyak lebih dari satu kali karena kepuasan akan produk yang dihasilkan industri pertahanan domestik negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Sebagai salah satu contohnya adalah kapal perang *Strategic Sealift Vessel* (SSV) yang dipesan oleh Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam dan bahkan beberapa di antaranya telah sampai di negara tujuan. Dan bahkan karena kepuasannya akan produk yang dihasilkan industri pertahanan Indonesia, Filipina kembali memesan dua unit kapal

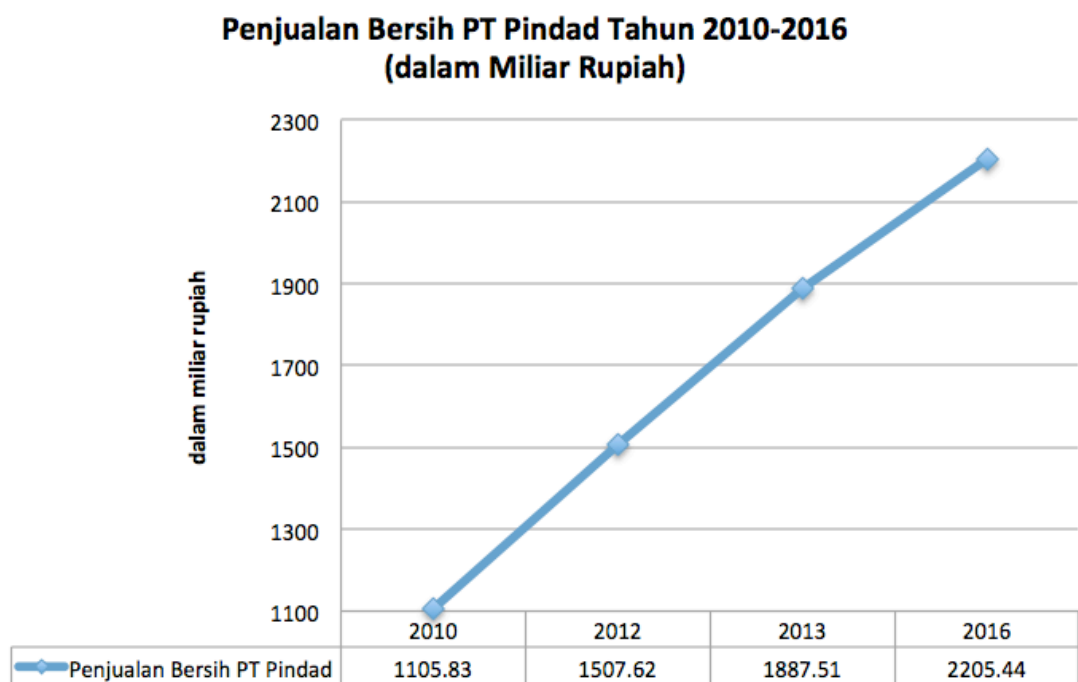
SSV lagi, ditambah satu unit SSV Hospital Ship, dan dua unit kapal jenis KCR 60 meter (Jakarta Post, 2017). Filipina bahkan beberapa kali memuji kualitas produk industri pertahanan Indonesia pada saat uji coba alutsista sebelum dikirimkan dan diakuisisi sepenuhnya olehnya. Di samping itu, Malaysia juga telah kembali memesan kapal yang diproduksi industri pertahanan Indonesia dengan jenis *Landing Platform Dock* (LPD) yang dapat memuat hingga lima helikopter (Billy, 2017). Sebelumnya, Filipina juga telah membeli kapal LPD-122m buatan PT PAL sebanyak dua unit dan telah tuntas pada tahun 2016 (Stockholm International Peace Research Institute, 2016).

Selain kapal, industri pertahanan Indonesia juga kebanjiran pesanan pesawat dari negara-negara ASEAN. Thailand merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah beberapa kali melakukan pembelian pesawat ke PT Dirgantara Indonesia. Lebih lanjut, Filipina juga telah membeli dua unit pesawat NC-212i guna mendukung kemampuan angkatan bersenjata yang telah sampai pada tahun 2017 (Waldron, 2016). Sementara itu, Vietnam juga telah memesan dua unit NC212-400 dari Indonesia setelah sebelumnya negara republik sosialis itu telah membeli tiga unit pesawat dengan jenis yang sama (Sidharta, 2016).

Di samping itu, PT Pindad juga telah banyak menerima pesanan dan pembelian dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Laos, Filipina, Kamboja dan Thailand, yakni meliputi produk militer seperti senapan otomatis, pistol, peluncur granat, amunisi dan kendaraan perang (Afrida, 2015). Kualitas produk senjata PT Pindad memang telah dikenal dunia sejak lama. Dan meskipun alutsista merupakan ranah baru bagi PT Pindad, namun produksi kendaraan perang yang dimulai sejak tahun 2008 telah mencuri perhatian berbagai negara baik di dalam maupun di luar kawasan. Di dalam kawasan, Malaysia dan Singapura merupakan contoh negara yang menggunakan kendaraan tempur buatan PT Pindad untuk mengangkut personel di medan perang, yakni dengan jenis Panser Anoa 6x6 (PT Pindad, 2016).

Banjirnya pesanan senjata tentunya berdampak positif terhadap

jumlah penjualan PT Pindad, utamanya setelah adanya pembinaan industri pertahanan yang tergabung ke dalam rangkaian pelaksanaan atau implementasi kebijakan MEF. Berdasarkan Laporan Tahunan PT Pindad (2016), penjualan bersih PT Pindad pada tahun 2010 adalah sebanyak Rp. 1.105,83 miliar. Oleh karena banyaknya pesanan senjata dan alutsista, maka penjualan bersih PT Pindad meningkat sebanyak Rp. 401,79 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.507,62 miliar. Penjualan terus meningkat pada tahun selanjutnya yang disebabkan oleh melonjaknya pesanan dari negara-negara di dalam maupun di luar kawasan, di mana angka penjualan bersihnya mencapai Rp. 1.887,51 miliar. Dan bahkan, pada tahun 2016 jumlah penjualan bersih PT Pindad berada pada angka yang tertinggi yaitu mencapai Rp. 2.205,44 miliar. Adapun gambaran peningkatan penjualan bersih PT Pindad ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Grafik Penjualan Bersih PT Pindad Tahun 2010-2016
(Sumber: PT PINDAD, 2016)

Peningkatan penjualan PT Pindad dan tingginya apresiasi negara-negara ASEAN terhadap alutsista yang diproduksi baik oleh Dirgantara Indonesia, PT PAL maupun PT Pindad, tentunya memberikan dampak

positif terhadap perkembangan industri pertahanan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah ekspor alutsista Indonesia yang meningkat. Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* (2016), pada tahun 2008 nilai ekspor alutsista Indonesia hanya berjumlah 1000.000 USD. Hal ini berarti, sebelum adanya kebijakan MEF, nilai ekspor alutsista Indonesia sangat rendah apabila dibandingkan dengan Singapura yang pada saat itu nilainya sudah melebihi angka 30.000.000 USD. Namun, dengan adanya kebijakan MEF, nilai ekspor alutsista Indonesia mulai mengalami peningkatan. Tepatnya setahun setelah kebijakan MEF mulai diimplementasikan, nilai ekspor alutsista Indonesia mengalami peningkatan sebanyak delapan kali lipat dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu dengan nilai 8.000.000 USD. Dan bahkan dalam waktu lima tahun setelahnya, nilai ekspor alutsista Indonesia sudah meningkat dengan sangat signifikan. Menurut data dari SIPRI, nilai ekspor alutsista Indonesia di tahun 2016 mencapai angka 94.000.000 USD (*Stockholm International Peace Research Institute, 2016*). Adapun peningkatan nilai ekspor alutsista Indonesia dapat ditunjukkan melalui Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Grafik Nilai Ekspor Alutsista Indonesia

(Sumber: *Stockholm International Peace Research Institute, 2016*)

Selanjutnya dalam konteks regional, negara-negara ASEAN telah sepakat untuk membentuk wadah kerjasama di bidang pertahanan pada tahun 2011 yang diberi nama *ASEAN Defence Industry Collaboration* (ADIC). Langkah tersebut diinisiasi oleh Malaysia pada saat pertemuan ADMM yang kelima. Secara garis besar, tujuan dari kerjasama pertahanan ini adalah untuk mengurangi jumlah impor senjata negara-negara ASEAN, di mana belanja militer di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Hal tersebut mengingat negara-negara ASEAN tengah gencar dalam melakukan pembangunan kekuatan pertahanan atau modernisasi militer, termasuk Indonesia.

Secara keseluruhan, negara-negara anggota dari ADIC meliputi Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Sejauh ini, keempat negara tersebut telah membuat *concept paper* dalam membangun ADIC pada tahun 2011 dan kerangka kerja untuk implementasi ADIC pada tahun 2016. Merujuk pada dokumen *Framework for the Implementation of ASEAN Defence Industry Collaboration* yang diterbitkan oleh *ASEAN Secretariat* (2016), aktivitas-aktivitas yang dirumuskan dalam kerangka kerja bagi implementasi ADIC meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan di sektor industri pertahanan;
- b. *Joint-venture* dan *co-production* proyek yang disepakati;
- c. Penelitian bersama dan pengembangan proyek yang disepakati; dan
- d. Promosi bersama pada pengembangan proyek.

Pada dasarnya, ADIC diharapkan dapat membantu Indonesia dalam implementasi kebijakan MEF. Pasalnya, apabila kerjasama pertahanan ADIC dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan memberi manfaat pada perkembangan industri pertahanan Indonesia yang saat ini bahkan sudah mulai membaik. Di samping itu, bahkan ADIC dapat membuka kesempatan bagi kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk pengadaan alutsista untuk memenuhi kebutuhan TNI yang sebelumnya tidak pernah ada. Kerjasama pertahanan yang dimaksud dapat berupa produksi alutsista bersama dengan mengandalkan spesialisasi masing-masing negara.

4.2.3 Diplomasi Pertahanan Indonesia-ASEAN untuk Penyelarasan Kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan *ASEAN Political Security Community*

Selain melibatkan negara-negara ASEAN dalam proses implementasi kebijakan MEF, Indonesia juga melakukan serangkaian aktivitas diplomasi pertahanan lainnya untuk mencegah perlombaan senjata terjadi di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN ditinjau dari tiga bentuk, yaitu Buku Putih Pertahanan Indonesia, *ASEAN Security Outlook* (ASO), dan kerjasama praktis ASEAN. Adapun kerjasama praktis ASEAN yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada *Multilateral Coordinated Patrol* (MCP), *ASEAN Defence Ministers' Meeting*, *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* dan *Our Eyes Initiative* karena keempatnya baru dibentuk setelah ide mengenai APSC lahir pada tahun 2003.

4.2.3.1 Buku Putih Pertahanan Indonesia

Buku Putih Pertahanan Indonesia merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan yang berisi mengenai penjelasan terkait kebijakan pertahanan Indonesia sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara dalam menghadapi berbagai macam ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non tradisional. Buku Putih Pertahanan telah dipublikasikan secara bebas, terutama bagi pihak-pihak tertentu yang berada di lingkungan komunitas pertahanan (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Bahkan, untuk memudahkan masyarakat asing dan para pemangku kepentingan negara lain yang ingin memahami kebijakan pertahanan Indonesia, Buku Putih Pertahanan disebarkan dalam dua versi bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia dijelaskan bahwa penyebarluasan dokumen yang berisi kebijakan pertahanan Indonesia tersebut merupakan sebagai salah satu instrumen dalam menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain guna membangun rasa saling percaya, kesetaraan, dan menghormati

(Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Melalui Buku Putih Pertahanan, Kementerian Pertahanan mencoba untuk memberikan pengertian kepada khalayak publik mengenai perspektif ancaman, esensi pertahanan negara serta kebijakan, strategi dan pembinaan kemampuan pertahanan negara, postur pertahanan negara, dan lain sebagainya. Di dalam buku tersebut juga dibahas secara rinci mengenai upaya pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang dirumuskan melalui kebijakan MEF. Adapun Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia tidak ditujukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme angkatan bersenjata, dengan mendasar pada visi, misi, nawacita, dan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Kementerian Pertahanan juga menambahkan bahwa setiap arah dan kebijakan pertahanan Indonesia selalu disesuaikan dengan politik bebas aktif dengan juga berpedoman kepada prinsip cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, serta berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Dengan kata lain, Buku Putih Pertahanan adalah acuan bagi negara-negara ASEAN yang berisi gambaran pemahaman pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia (Sugeng, komunikasi personal, 24 Oktober 2017).

Lebih lanjut, Sugeng (2017) juga menambahkan bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan MEF merupakan upaya Indonesia dalam mewujudkan postur pertahanan negara untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan beragam. Bahkan, poin tersebut juga beberapa kali dipertegas dalam Buku Putih Pertahanan dengan menjelaskan arah pembangunan pertahanan negara Indonesia ditujukan bagi peningkatan kekuatan, kemampuan, dan gelar TNI secara proporsional agar dapat melindungi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dan mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia, serta agar dapat menghadapi ancaman

militer, nirmiliter dan hibrida. Selain itu, di dalam sub pokok pembahasan mengenai pembangunan pertahanan negara, Kementerian Pertahanan mencoba menjabarkan mengenai macam-macam kebutuhan alutsista yang dibutuhkan TNI guna mewujudkan kekuatan pokok minimum, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Darat meliputi senjata, kendaraan tempur, panser yonif mekanis, ranpur kavaleri, kendaraan taktis, kendaraan administrasi, kendaraan khusus, alat angkut air, perbekalan udara, pesawat terbang, materiil zeni, alat perhubungan, material khusus intel, munisi, optik, alat optik, materiil komando pasukan khusus, dan alat kesehatan serta rematerialisasi berbagai satuan.
- b. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Laut meliputi Kapal Republik Indonesia, Pesawat udara, Ranpur Marinir, Peralatan Laut Khusus, Material Perbekalan dan Material Khusus. Selain itu, dilaksanakan penghapusan KRI, Pesud, dan Ranpur yang secara operasional sudah tidak efektif.
- c. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Udara pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat VIP/VVIP, pesawatintai, pesawat helikopter, pesawat latihan, Pesawat Terbang Tanpa Awak, Satuan Radar, Satuan Tembak Peluru Kendali jarak sedang, dan Baterai Penangkis Serangan Udara jarak pendek (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Dan untuk mendukung sub pokok pembahasan pembangunan pertahanan negara, Kementerian Pertahanan juga melengkapinya dengan memasukkan unsur anggaran pertahanan dan industri pertahanan yang dijelaskan secara terpisah pada sub pokok bagian masing-masing. Pada bagian anggaran pertahanan, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa alokasi anggaran pertahanan memang salah satunya diarahkan untuk pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal. Melalui Buku Putih Pertahanan, Indonesia juga memberikan gambaran proyeksi anggaran pertahanan bagi pencapaian MEF yang

diharapkan dapat berada di atas 1% dari PDB dan meningkat secara bertahap dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

4.2.3.2 ASEAN Security Outlook

ASEAN Security Outlook (ASO) merupakan salah satu wujud diplomasi pertahanan negara-negara ASEAN dalam membantu mewujudkan pencapaian APSC dengan cara mengedepankan transparansi dan pengertian akan kebijakan pertahanan dan situasi keamanan di kawasan (ASEAN, 2015). Dokumen ini dipublikasikan secara bebas dan bahkan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya melalui situs halaman ASEAN. Hingga tahun 2017, ASO sudah diterbitkan dalam tiga edisi, yaitu edisi tahun 2013, 2015 dan 2017. Adapun pembuatan dan penerbitan ASO merupakan salah satu wujud kontribusi negara-negara ASEAN terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan berdasarkan kepada komitmen yang terkandung dalam berbagai dokumen dan mekanisme ASEAN (ASEAN, 2015). Sehingga, pembahasan yang ada di dalam dokumen ini meliputi prinsip dan visi ASEAN serta mekanisme kerjasama pertahanan untuk mendukung hal tersebut, kebijakan pertahanan serta pandangan terhadap ancaman keamanan masing-masing negara anggota ASEAN, dan prospek serta ancaman bagi ASEAN di masa depan.

Pada sub pokok bagian Indonesia, pembahasan dibagi atas pandangan Indonesia terhadap tantangan keamanan nasional dan kawasan, kebijakan pertahanan Indonesia, dan kontribusi nasional untuk mewujudkan keamanan kawasan. Dalam menjelaskan pandangannya terhadap tantangan dan ancaman keamanan, Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada isu-isu non tradisional, utamanya terkait dengan kemaritiman mengingat negara kepulauan tersebut tengah berupaya untuk mencapai Poros Maritim Dunia. Adapun perhatian Indonesia terhadap ancaman keamanan tradisional meliputi proliferasi nuklir, sengketa Laut Cina Selatan, dan konflik internal. Indonesia bahkan

menegaskan bahwa negara-negara ASEAN bukanlah ancaman dan juga mengajak para mitranya tersebut untuk meningkatkan rasa saling percaya.

Lebih lanjut, pada bagian pembahasan kebijakan pertahanan, Indonesia memberikan penjelasan yang cukup rinci terkait upaya pembangunan kekuatan pertahanannya yang dikenal sebagai MEF. Merujuk pada Yoedhi Swastanto (2017), ASO merupakan wujud transparansi untuk menjelaskan kebijakan MEF dalam hal tujuannya untuk menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Oleh karenanya di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa MEF merupakan pengembangan postur militer ideal yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas utama TNI dalam mempertahankan dan menjaga seluruh wilayah NKRI (ASEAN, 2015). Selain itu, di dalam dokumen ASO juga dijelaskan bahwa selain menjaga keutuhan wilayah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan MEF Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan unit tempur dan persiapan unit siaga untuk keadaan darurat, termasuk dalam hal manajemen bencana dan misi pemeliharaan perdamaian dalam mendukung operasi penjaga perdamaian.

Di samping itu, Indonesia juga menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan MEF di dalam ASO. Salah satu di antaranya adalah dengan menginformasikan kepada negara-negara ASEAN lainnya bahwa dalam rangka implementasi MEF, Indonesia secara bertahap akan meningkatkan anggaran pertahanannya agar dapat mencapai target yang telah diatur melalui MEF dan juga dapat membantu pencapaian postur ideal TNI. Bahkan, di dalam ASO juga dijelaskan bahwa diharapkan anggaran pertahanan Indonesia dapat mencapai angka 1% dari GDP dan dapat terus meningkat pada dekade selanjutnya (ASEAN, 2017).

4.2.3.3 Kerjasama praktis ASEAN

Merujuk pada Ingan Malem (2017), diplomasi pertahanan dalam bentuk kerjasama praktis sedang kental di kawasan Asia Tenggara saat

ini. Sejak pengesahan APSC di bawah Bali Concord II pada tahun 2003, kerjasama pertahanan di ASEAN telah berkembang secara signifikan. Salah satunya adalah dengan menindaki secara serius masalah keamanan maritim yang kemudian diwujudkan dengan membentuk *Multilateral Coordinated Patrol*. Pelembagaan *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) pada tahun 2006 beserta *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus) di tahun 2010 menandai adanya perluasan kerjasama pertahanan multilateral negara-negara ASEAN. Lebih lanjut, baru-baru ini ASEAN bahkan merambah area kerjasama pertahanan dengan fokus pembagian informasi intelijen melalui kerangka *Our Eyes Initiative* (OEI).

a. *Multilateral Coordinated Patrol*

Dalam dekade terakhir, isu keamanan maritim tengah menarik perhatian negara-negara ASEAN, utamanya yang secara geografis wilayahnya terletak di pesisir pantai. Oleh karenanya, beberapa negara ASEAN kemudian membangun kerjasama multilateral untuk menangani ancaman keamanan maritim seperti pembajakan dalam bentuk patroli terkoordinasi yang seringkali disebut sebagai *Multilateral Coordinated Patrol* (MCP). Pada awalnya, kerjasama pertahanan ini dilaksanakan di luar kerangka kerjasama ASEAN. Namun kemudian, ASEAN mengadopsi MCP ke dalam bagian kerjasama yang berada di bawah kerangka ADMM-Plus.

MCP mulai dilaksanakan pertama kali oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada bulan Juli 2004 yang kemudian patrolinya diberi nama MALSINDO CORPAT (MINDEF Singapore, 2004). Patroli ini dilakukan untuk mengamankan wilayah Selat Malaka yang terkenal rawan akan pembajakan dan perampokan bersenjata. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ketiga negara tersebut menyepakati bahwa kerjasama pertahanan ini terbatas dalam bentuk patroli terkoordinasi yang dilaksanakan secara terpusat di wilayah kedaulatan masing-masing negara.

Cakupan kerjasama MCP kemudian meluas tidak hanya terbatas pada patroli terkoordinasi saja, melainkan mencakup kerjasama intelijen sebagai wadah untuk saling bertukar informasi. Perluasan kerjasama tersebut dilakukan dengan mendirikan *Eyes in the Sky* (EiS) pada tahun 2005 sebagai hasil dari pertemuan *Shangri-La Dialogue* (MINDEF Singapore, 2004). Keterlibatan Angkatan Udara di dalam kerjasama pertahanan ini dibutuhkan untuk mendukung kerjasama MCP melalui operasi patroli maritim yang dilaksanakan dari udara. Selain itu, perluasan kerjasama MCP juga meliputi penambahan anggota, yaitu Thailand yang telah melaksanakan patroli terkoordinasi pertama kali di tahun 2008 (MINDEF Singapore, 2004). Patroli terkoordinasi yang melibatkan Angkatan Laut Thailand ini kemudian disebut dengan *Malacca Strait Sea Patrols* (MSSP). Akan tetapi secara operasional, keempat negara ASEAN menyepakati untuk membatasi keterlibatan pihak eksternal di dalam pelaksanaan kerjasama mereka, terkecuali dalam EiS yang masih memungkinkan keterlibatan negara-negara lain secara sukarela, jika dianggap perlu oleh negara-negara anggota.

Terlepas dari patroli terkoordinasi di wilayah Selat Malaka, baru-baru ini juga telah dibentuk sebuah kerjasama pertahanan dengan bentuk serupa yang difokuskan untuk pemberantasan ancaman terorisme dan kejahatan transnasional. Kerjasama tersebut baru secara resmi dibentuk pada tahun 2017 dan diberi nama dengan *Trilateral Maritime Patrol* INDOMALPHI (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Patroli terkoordinasi ini melibatkan tiga satuan Angkatan Laut dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina. Adapun ketiga negara tersebut telah membuat deklarasi bersama INDOMALPHI yang terkait akan empat hal, yaitu:

- a. Melakukan patroli di antara ketiga negara dengan menggunakan mekanisme yang ada sebagai modalitas;
- b. Memberikan bantuan segera untuk keselamatan orang-orang dan kapal-kapal yang berada dalam bahaya di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama;

- c. Menetapkan *focal point* nasional di antara ketiga negara untuk memfasilitasi pembagian informasi dan intelijen secara tepat waktu serta koordinasi jika terjadi ancaman darurat dan keamanan; dan,
- d. Untuk membangun *hotline* komunikasi di antara ketiga negara untuk lebih memudahkan koordinasi selama situasi darurat dan ancaman keamanan (Kementerian Luar Negeri, 2016).

Dan pada pertemuan kedua INDOMALPHI, ketiga negara yang terlibat juga telah membuat pernyataan bersama terkait lima poin penting dalam pelaksanaan kerjasama pertahanannya, yaitu:

- a. Kegiatan militer terkoordinasi;
- b. Patroli maritim dan trilateral;
- c. *Database sharing*;
- d. Kelompok kerja Patroli Maritim Trilateral;
- e. *Malacca Strait Patrol* dapat diadopsi sebagai model (Ikrami, 2017).

b. *ASEAN Defence Ministers' Meeting*

ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) merupakan forum dialog pertahanan ASEAN pertama yang mampu mempertemukan seluruh Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN. Didirikan pada tahun 2006, ADMM dibentuk sebagai bentuk respon negara-negara ASEAN terhadap ancaman-ancaman keamanan baru yang ada di kawasan Asia Tenggara (Oktaheroe Ramsi, komunikasi personal, 6 Desember 2017). Adapun dalam peluncurannya, para Menteri Pertahanan ASEAN menyepakati bahwa ADMM memiliki empat tujuan spesifik, yaitu:

- a. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui dialog dan kerjasama dalam pertahanan dan keamanan;
- b. Memberikan panduan bagi dialog serta kerjasama pertahanan dan keamanan yang melibatkan pejabat senior pertahanan dan militer yang berada di bawah kerangka kerjasama ASEAN serta di antara ASEAN dan negara-negara mitra dialog;

- c. Untuk mempromosikan kepercayaan melalui pemahaman yang lebih besar mengenai tantangan pertahanan dan keamanan serta peningkatan transparansi dan keterbukaan;
- d. Memberikan kontribusi pada pembentukan komunitas keamanan ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam *Bali Concord II* dan untuk mendukung implementasi *Vientiane Action Programme* yang ada di dalam APSC (ASEAN Secretariat, 2006).

Mekanisme kerjasama pertahanan tertinggi di ASEAN tersebut memiliki empat isu keamanan non tradisional sebagai fokus agendanya saat ini, yaitu bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi penjagaan perdamaian dan industri pertahanan (Oktaheroe Ramsi, komunikasi personal, 6 Desember 2017). Adapun capaian-capaian dari kegiatan diplomasi pertahanan yang dilangsungkan berdasarkan keseluruhan agenda tersebut telah terhitung cukup banyak dan semakin berkembang hingga saat ini. Sebagai contohnya, negara-negara ASEAN telah berhasil menyepakati bermacam-macam *concept papers* untuk meningkatkan kerjasama di area bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Sama halnya dengan area bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, *concept papers* mengenai pembangunan *ASEAN Peacekeeping Centers Network* juga telah dibentuk pada tahun 2012. Di samping itu, pengembangan kerjasama di bidang industri pertahanan juga bisa dilihat dari dibentuknya *ASEAN Defence Industry Collaboration* (Oktaheroe Ramsi, komunikasi personal, 6 Desember 2017).

Kebijakan pertahanan masing-masing negara seperti pembangunan kekuatan pertahanan tidak pernah menjadi agenda khusus yang dibahas di dalam pertemuan yang ada pada forum ADMM (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Akan tetapi, upaya peningkatan pemahaman terkait kebijakan pertahanan dan keamanan nasional antar sesama negara anggotanya merupakan salah satu program penting yang ada di dalam setiap program kerja tiga tahun ADMM. Dalam prakteknya, aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung

program tersebut meliputi saling membagikan informasi dan bertukar kebijakan pertahanan dan keamanan nasional berikut perkembangannya serta menyelenggarakan konferensi, lokakarya dan seminar tentang isu atau ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional (ASEAN Secretariat, 2014).

Di samping itu, pada bulan Mei 2016 para Menteri Pertahanan ASEAN juga telah membuat deklarasi bersama untuk memperkuat upaya ADMM dalam menggalakkan perdamaian dan keamanan regional melalui dialog dan kerjasama untuk menuju pencapaian APSC. Dan melalui deklarasi bersama tersebut, negara-negara ASEAN juga menyepakati bahwa kerjasama pertahanan ADMM harus didasarkan kepada penghormatan terhadap kedaulatan dan integrasi teritorial pengambilan keputusan berbasis konsensus, partisipasi atas dasar fleksibilitas, sukarela dan tidak mengikat, aset yang berada di bawah komando dan kontrol nasional untuk mendukung kerjasama terbuka dan inklusif secara efektif dalam menangani tantangan keamanan kontemporer sesuai dengan *ASEAN Charter* dan hukum internasional (ASEAN Secretariat, 2017).

c. *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus*

Setelah membentuk ADMM, negara-negara ASEAN kemudian melanjutkan upayanya untuk mengembangkan kerjasama pertahanan dan keamanan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan mendirikan forum dialog pertahanan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus). ADMM-Plus merupakan kerjasama pertahanan negara-negara ASEAN beserta delapan negara mitra yaitu Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat. Forum dialog pertahanan yang mempertemukan para Menteri Pertahanan ASEAN dan delapan negara di luar kawasan ini dibentuk pada pertemuan ADMM keempat yang dilaksanakan di Vietnam pada tahun 2010. Adapun tujuan pembentukannya adalah untuk mengatasi ancaman-ancaman keamanan kawasan yang bersifat

kompleks.

Hingga saat ini, setidaknya ADMM-Plus memiliki tujuh area prioritas dalam melaksanakan kerjasama praktisnya yang dikenal dengan nama *Expert Working Groups* (EWG), yaitu keamanan maritim, kontra terorisme, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi penjagaan perdamaian, pengobatan militer, *humanitarian mine action* dan *cyber security*. Adapun dalam menjalankan kerjasama pertahanannya tersebut, 18 negara anggota ADMM-Plus kemudian menyepakati pembuatan prinsip-prinsip keanggotaannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Negara Plus harus menjadi negara Mitra Dialog ASEAN secara utuh;
- b. Negara Plus harus memiliki interaksi dan hubungan yang signifikan dengan pembangunan pertahanan ASEAN;
- c. Negara Plus harus dapat bekerjasama dengan ADMM untuk membangun kapasitas sehingga dapat meningkatkan keamanan kawasan secara substantif untuk mendukung pembangunan kapasitas di kawasan dalam bidang pertahanan dan keamanan (ASEAN Secretariat, 2017).

Dilihat dari ketujuh EWG yang dimilikinya, ADMM-Plus telah menghasilkan banyak pencapaian yang berarti sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Salah satunya adalah pada area operasi penjagaan perdamaian yang diketuai oleh Indonesia, di mana seluruh negara anggota ADMM-Plus akhirnya menyepakati untuk melaksanakan latihan bersama dalam bentuk latihan lapangan atau *field training exercise* (FTX) di tahun 2019 (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). Di samping itu, 18 negara anggotanya bahkan juga bersedia untuk menyumbangkan asetnya dalam bentuk alutsista seperti kapal ataupun tenaga ahli untuk kepentingan latihan bersama pengobatan militer serta bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau yang biasa disebut sebagai *ADMM-Plus Military Medicine and Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise* (AMHEX) (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). Bahkan, signifikansi forum dialog pertahanan dan kerjasama praktis dapat terlihat dari bagaimana

negara-negara anggotanya akhirnya memutuskan untuk membuat pertemuan ADMM-Plus menjadi setahun sekali, di mana pada awal pembentukannya hanya sebatas tiga tahun sekali (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017).

d. *Our Eyes Initiative*

Our Eyes Initiative (OEI) adalah sebuah kerangka kerjasama pertahanan berbasis pembagian informasi intelijen yang digagas oleh Indonesia (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). Kerjasama pertahanan ini beranggotakan enam negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand dan Singapura. Yoedhi Swastanto (2017) menjelaskan bahwa kerjasama intelijen ini meliputi pembuatan bank data, setelah portal bersama ASEAN sudah dibentuk melalui *ASEAN Information Sharing Portal*. OEI baru secara resmi dibentuk pada bulan Januari 2018, pada saat pertemuannya diadakan pertama kali di Filipina. Dan gagasan mengenai pembentukan OEI sudah disampaikan pada pertemuan ADMM yang diselenggarakan pada tahun 2017 (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017).

Secara garis besar, fokus dalam kerjasama pertahanan ini adalah untuk memberantas ancaman terorisme dan radikalisme yang ada di kawasan Asia Tenggara. Spesifiknya, Menteri Pertahanan Indonesia menjelaskan bahwa pendirian OEI ditujukan untuk mencegah aksi terorisme seperti yang di Marawi agar tidak terjadi lagi di negara-negara ASEAN, serta untuk mencegah Asia Tenggara dalam menjadi kawasan Timur Tengah selanjutnya. Menteri Pertahanan Indonesia juga menambahkan bahwa OEI diharapkan dapat membuat sinergitas dan koordinasi serta kecepatan dan ketepatan informasi terkait isu terorisme dan radikalisme di kawasan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga dapat membantu dalam memfasilitasi kerjasama regional yang lebih baik di Asia Tenggara (Parameswaran, 2018). Adapun dalam pelaksanaannya, negara-negara anggota OEI akan mengadakan pertemuan setiap dua minggu untuk bertukar informasi mengenai

kelompok militan dan mengembangkan *database* umum terkait kelompok ekstrimis yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan aksinya.

4.3 Pembahasan

Setelah analisis data dipresentasikan, uraian permasalahan penelitian akan dibahas serta disusun berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Peneliti membagi subbab pembahasan menjadi tiga bagian. Pertama, pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia dalam konteks *dynamic equilibrium* di kawasan Asia Tenggara. Kedua, diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN dalam konteks implementasi kebijakan *Minimum Essentials Force*. Dilanjutkan dengan diplomasi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelaraskan kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan *ASEAN Political Security Community*.

4.3.1 Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konteks *Dynamic Equilibrium* di Kawasan Asia Tenggara

Asia Tenggara merupakan satu-satunya kawasan yang saat ini mampu membuktikan bahwa sekumpulan negara-negara kecil dan *middle power* mampu mengatur tata kelola kawasan tanpa membutuhkan dominasi dari negara-negara *great power*. Bahkan, di saat persaingan kekuasaan yang besar tengah mengancam stabilisasi dan keamanan kawasan, negara-negara ASEAN mampu mengambil langkah dalam mengatasi isu tersebut secara mandiri. Terutama bagi Indonesia, yang memandang politik internasional sebagai lingkungan yang dipenuhi oleh permusuhan, ketidakpastian, dan ketidakamanan. Maka dari itu, Indonesia selalu menekankan kepada integrasi dan persatuan kawasan (Acharya, 2010). Salah satunya adalah dengan membentuk kerangka kerjasama regional, sehingga ASEAN mampu menjadi katalisator regionalisme Asia. Dengan membuat negara-negara untuk hadir dalam satu meja dan mengedepankan penggunaan diplomasi sebagai lawan dari penggunaan

kekuatan, ASEAN telah memberikan kontribusi pada dinamika regional yang lebih stabil (Egbrink, 2010).

Kerangka kerjasama regional yang telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi pengelolaan keamanan kawasan Asia Tenggara di antaranya adalah *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ADMM-Plus*, dan *East Asia Summit* (EAS). Keberhasilan dari tiga organisasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dari kesuksesan program-program yang dijalankannya, melainkan juga dari bagaimana negara-negara ASEAN mampu menahan Amerika Serikat dan Cina untuk terus berpartisipasi dan bekerjasama satu sama lain, sehingga kemudian tercipta kepentingan bersama. Bahkan, diplomasi negara-negara ASEAN terbukti sukses dalam melibatkan Amerika Serikat ke dalam kerangka kerjasama EAS, di mana sebelumnya Cina menentang keras kehadiran negara mitra terdekat Jepang tersebut.

Sebagai salah satu negara penting di Asia Tenggara, Indonesia memiliki perananan penting dalam membantu menyukseskan agenda ASEAN tersebut. Faktanya, keterlibatan Amerika Serikat di EAS tidak terlepas dari gagasan awal Indonesia untuk membawa negara adidaya tersebut ke dalam institusi regional. Tujuannya adalah bukan untuk menyeimbangkan kekuasaan Cina di EAS melainkan untuk menarik serta mengikat kedua negara (Hart, 2015). Indonesia bahkan merupakan tuan rumah bagi pertemuan EAS di tahun yang sama ketika Amerika Serikat hadir untuk pertama kalinya di dalam forum dialog tersebut. Diplomasi pertahanan Indonesia tersebut merupakan wujud pelaksanaan *Dynamic Equilibrium* yang difokuskan untuk melibatkan semua negara *major powers* dalam kerangka kerja yang lebih kooperatif sebagai dasar pengembangan arsitektur regional yang inklusif (Anwar, 2014).

Merujuk pada Acharya (2010) dalam bukunya *The Non Western International Relations Theory*, Indonesia memanfaatkan ASEAN sebagai arena yang memungkinkannya untuk menjadi pemain kunci (*key player*) di kawasan. Selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memang telah berupaya dalam meningkatkan profil

internasionalnya dan juga mendorong ASEAN untuk memainkan peran global yang lebih besar (Idiil Syawfi, komunikasi personal, 10 November 2017). Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, peningkatan peran ASEAN di dalam politik global tentunya akan berdampak langsung terhadap penguatan posisi Indonesia sebagai negara *middle power* dalam menjalankan strategi *Dynamic Equilibrium* yang digalakkannya.

Dalam konteks regional, tujuan utama Indonesia adalah untuk memastikan bahwa Asia Tenggara tetap bebas dari hegemoni kekuasaan luar manapun (Murphy, 2011). Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan *Dynamic Equilibrium* itu sendiri yaitu untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan yang diwujudkan dengan mendukung ide mengenai penciptaan keamanan bersama (*common security*), kesejahteraan, dan stabilitas. Sehingga, Indonesia kemudian mengajak negara-negara ASEAN dan mitra untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan wadah diplomasi pertahanan ASEAN baik melalui ARF, ADMM-Plus, maupun EAS sebagai mekanisme untuk mendorong pelaksanaan *Dynamic Equilibrium* di Asia Pasifik guna mengakomodasi peningkatan kekuatan Cina, mengenali kepentingan geopolitik Amerika Serikat, dan menegaskan perannya sebagai negara *middle power* dalam mengejar perdamaian dan keamanan. Tindakan tersebut didasarkan kepada argumen Natalegawa (2013) yakni dalam upaya menciptakan keamanan bersama, setiap negara harus sadar bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bukanlah tugas Indonesia saja atau negara lainnya sebagai unit tunggal, melainkan merupakan tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN dan para mitra. Adapun pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia melalui kerangka kerjasama ASEAN tersebut juga tentunya diselaraskan dengan Sentralitas ASEAN.

Sentralitas ASEAN memang memberikan negara-negara Asia Tenggara keleluasaan untuk mengatur keseluruhan agenda kerjasama regional tersebut. Setidaknya, sudah jelas bahwa tujuan dari diplomasi pertahanan Indonesia melalui *Dynamic Equilibrium* beserta diplomasi pertahanan ASEAN secara keseluruhan adalah untuk mencegah

hegemoni Amerika Serikat ataupun Cina, serta mengarahkan kedua kekuatan besar tersebut untuk menjauh dari konfrontasi. Akan tetapi, untuk dapat mempengaruhi persaingan kekuatan besar tersebut dibutuhkan penguatan kepemimpinan dan institusi yang lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Dan banyak dari aktor internasional yang mengharapkan Indonesia untuk mampu menjadi sosok pemimpin ASEAN guna menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan melalui strategi *Dynamic Equilibrium*.

Merujuk pada Yoedhi Swastanto (2017), posisi Indonesia sebagai negara Non Blok di dalam peta politik internasional menjadi salah satu pertimbangan terbesar mengapa negara dengan kekuatan pertahanan terbesar di Asia Tenggara tersebut dianggap mampu memimpin ASEAN. Di samping itu, posisi geografis Indonesia yang strategis juga turut mendukung Indonesia untuk memainkan peran besar di ASEAN, terutama mengingat wilayahnya yang dekat dengan Laut Cina Selatan yang dijadikan sebagai arena bagi persaingan dua kekuatan besar. Ditambah, Indonesia juga merupakan negara yang pada awalnya mengusulkan pendirian ASEAN, sehingga peran sentral Indonesia sudah terbangun sejak dulu.

Dalam mendukung argumen tersebut, Yoedhi Swastanto (2017) juga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia merupakan acuan bagi negara-negara lain. Dengan kata lain, negara-negara ASEAN banyak yang mengikuti apa yang Indonesia sarankan pada setiap dialog pertahanan multilateral. Bahkan, Menteri Pertahanan kerap kali menginisiasikan beberapa bentuk kerjasama pertahanan dan usulannya tersebut beberapa kali disetujui dan direspon positif oleh negara-negara lainnya di ASEAN. Salah satu buktinya adalah Indonesia telah berhasil dalam mengajak Cina dan negara-negara ASEAN lainnya yang menjadi *claimant states* Laut Cina Selatan untuk menyepakati Deklarasi *Code of Conduct* (COC) (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). COC tentunya penting guna menjauhkan kemungkinan dari penggunaan kekuatan militer sebagai opsi penyelesaian konflik.

Di samping itu, bukti lainnya adalah ketika terjadi konflik Marawi, Menteri Pertahanan Indonesia mengusulkan pembentukan kerjasama trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Usulan tersebut kemudian disepakati dan kemudian dibentuk operasi bersama yang ditujukan untuk menjaga stabilitas kawasan dalam menghadapi ancaman non tradisional seperti pembajakan, penculikan, terorisme dan kejahatan transnasional maritim lainnya yang telah diselenggarakan di Tarakan dan Sabah. Adapun untuk mendukung kerjasama tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia juga kemudian mengusulkan pembentukan *Our Eyes Initiative* (OEI) sebagai wadah untuk bertukar informasi intelijen mengenai kelompok militan dan mengembangkan *database* umum terkait kelompok ekstrimis yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan aksinya (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). Ide tersebutpun juga disambut baik oleh Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand dan Singapura sehingga pada bulan Januari 2018 kerjasama pertahanan tersebut resmi diluncurkan.

Yoedhi Swastanto (2017) juga menambahkan bahwa usulan Indonesia di dalam forum dialog pertahanan ASEAN memang selalu ditunggu-tunggu oleh negara lainnya, karena pasalnya negara-negara anggota ASEAN lainnya sangat menghormati Indonesia. Penghormatan tersebut pasalnya karena Indonesia merupakan negara yang dianggap negara-negara lain sebagai pemimpin di ASEAN (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). Dan sejatinya, Indonesia merupakan negara besar sehingga harus mampu berperan sesuai dengan anggapan tersebut. Kementerian Luar Negeri RI sebagai salah satu ujung tombak diplomasi pertahanan juga selalu ingin untuk menjadi inisiator bagi setiap kerjasama pertahanan di ASEAN. Hal tersebut penting untuk terus mempertahankan citra Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menggagas kerjasama pertahanan di ASEAN, bahkan sejak dari ASEAN baru dibentuk.

4.3.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Negara-Negara ASEAN dalam Mendukung Implementasi Kebijakan *Minimum Essentials Force*

Berdasarkan uraian analisis data mengenai kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung implementasi kebijakan *Minimum Essentials Force* (MEF), dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya dalam memenuhi kebutuhan alutsistanya dengan melakukan banyak kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain. Dan dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa pengadaan alutsista Indonesia dilakukan dengan melaksanakan diplomasi pertahanan dengan negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Perancis, dan lain sebagainya. Pasalnya, teknologi yang ditawarkan dari industri pertahanan milik negara-negara tersebut memang dikenal maju.

Merujuk pada Idiil Syawfi (2009), apabila ditinjau dari pelaksanaannya, diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN mendukung implementasi kebijakan MEF dapat dianalisis melalui dua aspek. Pertama, *defence diplomacy for defence capability*. Adapun aktivitas dari *defence diplomacy for defence capability* yang dianalisis di dalam penelitian ini akan dibatasi pada pembelian alutsista dari negara-negara ASEAN guna mendukung peningkatan kapabilitas Indonesia yang sedang diupayakan melalui kebijakan MEF. Hal ini juga didasarkan kepada argumen Andrew Cottey (2006) yang menyatakan bahwa penyediaan peralatan militer seperti dalam bentuk jual beli alat utama sistem persenjataan merupakan salah satu bentuk aktivitas diplomasi pertahanan.

Sejak kebijakan MEF resmi untuk diimplementasikan pada tahun 2010, tercatat bahwa Indonesia tidak pernah melakukan pembelian alutsista kepada negara-negara ASEAN (Lili Wahyu Sugiarto, 28 Januari 2018). Padahal selain Indonesia, terdapat enam negara ASEAN yang memiliki industri pertahanan yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Myanmar. Pasalnya, kebanyakan dari industri pertahanan

negara-negara ASEAN memang belum mampu berkembang sebaik Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Korea Selatan, maupun negara-negara lainnya yang produk alutsistanya pernah beberapa kali dipesan oleh Indonesia. Sehingga, hal ini kemudian mendorong Indonesia untuk mencari produsen militer di luar kawasan Asia Tenggara yang mampu menciptakan dan menjual alutsista yang dilengkapi teknologi yang lebih canggih dan kompleks dengan harga yang layak.

Faktanya, beberapa tahun ke belakang ini, Singapura selalu masuk ke dalam jajaran 20 negara eksportir senjata terbesar di dunia (Shan, 2013). Meskipun demikian, namun Indonesia tidak pernah tercatat untuk membeli alutsista yang diproduksi oleh Singapura. Memang tidak dapat disangkal bahwa pertimbangan untuk pembelian alutsista tidak mudah, karena Indonesia harus mampu memahami dan menentukan jenis seperti apa yang dibutuhkan dan cocok digunakan di wilayah Indonesia. Sehingga, pembelian alutsista jangan sampai menjadi sia-sia mengingat harganya yang tidak murah. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia hingga saat ini belum memaksimalkan diplomasi pertahanan dalam konteks pembelian alutsista terhadap negara-negara ASEAN.

Kedua, *defence diplomacy for defence industry*. Faktanya, pemerintah Indonesia tengah memaksimalkan pelaksanaan diplomasi pertahanan ini untuk mendukung pencapaian kemandirian alutsista. Bahkan di dalam dokumen MEF, Kementerian Pertahanan (2012) menyatakan bahwa pembinaan industri pertahanan memang telah menjadi fokus pelaksanaan MEF sejak tahun 2010. Selain untuk memenuhi kebutuhan TNI, pembinaan industri pertahanan juga ditujukan untuk mendorong ekspor alutsista ke negara-negara lain, terutama ASEAN yang merupakan negara-negara mitra terdekat Indonesia. Di samping itu, pembinaan industri pertahanan juga dapat dilaksanakan dengan cara memproduksi atau mengembangkan alutsista secara bersama dengan negara lain. Oleh karena itu, analisis terkait *defence diplomacy for defence industry* yang dibahas di dalam penelitian ini

difokuskan kepada dua variabel; yaitu penjualan hasil industri pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN dan kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara ASEAN.

Apabila ditinjau dari penjualan alutsista buatan industri pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN, dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara pemasok alutsista bagi negara-negara tetangganya tersebut. Faktanya, beberapa negara ASEAN yakni Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Laos merupakan konsumen dari produk industri pertahanan Indonesia. Dan kebanyakan dari negara-negara tersebut telah melakukan pembelian alutsista dari Indonesia sebanyak lebih dari satu kali. Bahkan, beberapa negara seperti Filipina mengagumi karya industri pertahanan Indonesia seperti kapal perang *Strategic Sealift Vessel* (SSV) yang telah dipesan dan dibeli olehnya. Oleh karena kekagumannya tersebut, Filipina kemudian kembali memesan SSV kembali di tahun 2017 dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, yakni meliputi dua unit kapal SSV lagi, ditambah satu unit SSV Hospital Ship, dan dua unit kapal jenis KCR 60 meter (Jakarta Post, 2017).

Selain Filipina, negara ASEAN lainnya yang telah berulang kali memesan alutsista buatan industri pertahanan Indonesia adalah Malaysia, Vietnam dan Thailand. Adapun diplomasi pertahanan yang dijalankan Indonesia dengan ketiga negara tersebut meliputi penjualan kapal jenis *Landing Platform Dock* (LPD) yang diproduksi oleh PT PAL dan pesawat yang diproduksi oleh Dirgantara Indonesia. Di samping itu, *defence diplomacy for defence industry* dijalankan oleh Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura dengan menjual kendaraan tempur buatan PT Pindad dengan jenis Panser Anoa 6x6 (PT Pindad, 2016).

Hingga saat ini, pelaksanaan *defence diplomacy for defense industry* terhadap negara-negara ASEAN dalam rangka mendukung implementasi MEF dapat dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana nilai ekspor alutsista Indonesia meningkat dengan drastis, di mana sebelum dijalankannya kebijakan MEF, tepatnya pada

tahun 2008, hanya berada pada angka USD 1.000.000 (Stockholm International Peace Research Institute, 2016). Dan faktanya, setelah setahun MEF diimplementasikan, nilai ekspor alutsista Indonesia meningkat hingga delapan kali lipat dari tahun 2008. Perkembangan industri pertahanan Indonesia juga kian tergambar dari setelah enam tahun pelaksanaan program kebijakan MEF, nilai ekspor alutsista Indonesia telah mencapai angka USD 94.000.000.

Peningkatan penjualan alutsista terhadap negara-negara ASEAN tentunya membuat badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri pertahanan seperti PT PAL, PT Pindad dan Dirgantara Indonesia, semakin diuntungkan secara ekonomi. Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan tersebut kemudian telah membuat rencana untuk mengembangkan teknologi untuk produksi jenis alutsista baru, seperti kapal selam, tank berukuran sedang dan roket (Endiarto, 2017). Kondisi ini menunjukkan adanya pembangunan dan penguatan industri pertahanan Indonesia serta menggambarkan bahwa Indonesia sedang dalam proses menghilangkan interdependensi terkait impor alutsista. Dan menurut konsep yang dijelaskan oleh Idiil Syawfi (2009), kedua hal tersebut merupakan bagian dari tujuan utama *defence diplomacy for defence industry*.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara ASEAN, analisis terkait *defence diplomacy for defence industry* yang Indonesia jalankan untuk mendukung implementasi kebijakan MEF dapat difokuskan melalui *ASEAN Defence Industry Collaboration (ADIC)*. Merujuk pada Idiil Syawfi (2009) yang menjelaskan tujuan dari *defence diplomacy for defence industry*, ADIC dibuat untuk meningkatkan ke membangun dan meningkatkan kemampuan industri pertahanan serta menciptakan kemandirian alutsista negara-negara ASEAN. Dan sebagai salah satu anggotanya, Indonesia tentu akan ikut mendapatkan hasilnya. Dalam artian, ADIC dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan MEF.

Awal berdirinya ADIC ditujukan untuk mengurangi jumlah impor

alutsista negara-negara ASEAN, mengingat belanja militer di kawasan Asia Tenggara sedang sangat tinggi beberapa tahun ke belakang ini (Idiil Syawfi, komunikasi personal, 10 November 2017). Dengan beranggotakan Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand, ADIC telah memiliki beberapa pencapaian dalam hal kerjasama pertahanannya. Di antaranya adalah dengan telah disepakatinya *concept paper* dan kerangka kerja sebagai bentuk implementasi ADIC. Adapun aktivitas-aktivitas yang meliputi kerjasama pertahanan ASEAN di bidang pertahanan ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan di sektor industri pertahanan;
- b. *Joint-venture* dan *co-production* proyek yang disepakati;
- c. Penelitian bersama dan pengembangan proyek yang disepakati; dan
- d. Promosi bersama pada pengembangan proyek (ASEAN Secretariat, 2016).

Menurut mantan Menteri Pertahanan Indonesia, yakni Purnomo Yusgiantoro, bentuk-bentuk aktivitas yang dirancang dalam kerangka kerja ADIC menuntut keberadaan industri pertahanan yang terspesialisasi di antara negara anggotanya. Selanjutnya, Purnomo juga menambahkan bahwa pembangunan industri pertahanan di negara-negara anggota ASEAN bisa dengan terwujud jika masing-masing negara berbenah dan bisa fokus pada kekuatan yang paling unggul dan paling dominan yang dimiliki suatu negara (Berita Satu, 2011). Akan tetapi, perlu disadari bahwa spesialisasi tersebut juga tidak mudah dan membutuhkan waktu. Sehingga aktivitas pelaksanaan diplomasi pertahanan melalui ADIC lebih banyak menitikberatkan pada penyelenggaraan seminar industri pertahanan sebagai langkah awalnya.

Pada dasarnya, bentuk diplomasi pertahanan yang paling efektif untuk membangun dan meningkatkan kemampuan industri pertahanan negara-negara ASEAN adalah *joint-venture* ataupun *co-production*. Dalam artian, negara-negara ASEAN berkolaborasi secara bersama-sama dalam memproduksi ataupun mengembangkan suatu jenis alutsista. Adapun keuntungan dari pelaksanaan diplomasi pertahanan ini adalah negara akan mengeluarkan biaya penelitian yang lebih sedikit apabila

dibandingkan dengan produksi atau pengembangan secara tunggal. Akan tetapi, untuk mendukung hal tersebut, diperlukan spesialisasi setiap negara ASEAN serta kesetaraan kemampuan industri pertahanan.

Menurut penelitian yang dikembangkan oleh Dicky Hadi Wijaya (2015), kolaborasi industri pertahanan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan melalui kerangka kerjasama ADIC adalah produksi bersama kapal. Pasalnya, Indonesia memiliki keunggulan dalam memproduksi kapal. Ditambah, Singapura juga sebelumnya telah beberapa kali memproduksi kapal seperti dengan jenis *endurance amphibious assault landing ship* yang bahkan telah dibeli oleh Thailand pada tahun 2012 lalu. Dan mengingat jurang antar kemampuan industri pertahanan Indonesia dan Singapura adalah yang tidak terlalu besar di antara negara-negara ASEAN lainnya, maka kolaborasi industri pertahanan dapat dimulai dari dua negara tersebut.

4.3.3 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menyelaraskan Kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan ASEAN *Political Security Community*

Kedekatan geografis mengakibatkan hubungan keamanan di antara negara-negara ASEAN saling terkait satu sama lain. Hal ini lah yang kemudian memicu terjadinya peningkatan belanja militer yang sangat tinggi di kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali bagi Indonesia yang saat ini tengah melaksanakan program pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan melalui kebijakan MEF. Sebagai akibat dari tingginya angka pembelian alutsista, timbul keresahan dari masyarakat internasional utamanya dari beberapa pakar hubungan internasional, bahwasanya sewaktu-waktu perlombaan senjata dapat terjadi. Ancaman perlombaan senjata di masa depan yang mungkin terjadi di antara negara-negara ASEAN tersebut, yang di mana salah satunya juga dipicu oleh pelaksanaan kebijakan MEF, ditakutkan akan menghalangi pencapaian visi APSC, yaitu untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil.

Selanjutnya, diplomasi pertahanan menjadi instrumen yang penting untuk mencegah terjadinya perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, merujuk kepada Rodon Pedrason (2015), diplomasi pertahanan dapat dijadikan sebagai cara dan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang kemungkinan sedang memiliki persaingan dengan negara lainnya, akan tetapi mereka tetap melaksanakan berbagai macam praktek kerjasama termasuk dalam bidang ekonomi, budaya dan politik, serta melakukan kerjasama dan diplomasi pertahanan untuk menjalin hubungan pertemanan, bekerjasama satu sama lain, dan yang paling penting adalah untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya. Sehingga, *defence diplomacy for confidence building measures* dilaksanakan untuk menjalin hubungan pertemanan dengan negara-negara ASEAN, di tengah situasi yang memungkinkan untuk terjadi persaingan pembangunan kekuatan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelaraskan kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan *ASEAN Political Security Community* dibahas dengan menggunakan konsep *defence diplomacy for confidence building measures*, yang akan dibagi ke dalam dua bentuk tindakan, yaitu *Principles/Declaratory Measures* dan *Transparency Measures*.

4.3.3.1 *Principles/Declaratory Measures*

Merujuk pada Buzan (2003), anarki ditambah dengan kedekatan dan keragaman geografis menghasilkan sebuah pola regional yang berdasar kepada kelompok, di mana kondisi keamanan yang saling bergantung menjadi lebih kuat di antara negara-negara yang ada di dalam *complexes* dibandingkan dengan yang berada di luarnya. Ketika Indonesia mengeluarkan kebijakan MEF pada tahun 2010, tentunya akan memberikan pengaruh bagi kondisi keamanan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Setidaknya hal tersebut dapat menggambarkan *Regional Security Complex* di kawasan Asia Tenggara,

yang kemudian menyebabkan ancaman perlombaan senjata menjadi muncul di permukaan.

Terlepas dari persaingan yang ada di kawasan Asia Tenggara, menurut teori *Regional Security Complex*, negara-negara ASEAN juga tetap merumuskan kepentingan bersama yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk komunitas keamanan yang dikenal sebagai APSC. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Deutsch (1961) mengenai konsep komunitas keamanan, APSC merupakan wujud integrasi negara-negara ASEAN dalam bentuk institusi yang mengandung praktik formal ataupun informal, yang di mana tujuannya adalah untuk memastikan perubahan yang damai (*peaceful change*) dengan '*reasonable certainty*' dalam jangka waktu yang lama di antara negara-negara anggotanya. Akan tetapi, sebagai sebuah komunitas keamanan di Asia Tenggara, kesuksesan APSC mensyaratkan tidak adanya perang dan perlombaan senjata.

Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, memang tidak pernah terjadi konflik terbuka yang mengindikasikan adanya perang di antara negara-negara anggotanya. Akan tetapi, kecenderungan perlombaan senjata yang ada di kawasan Asia Tenggara ditakutkan akan menjadi penghalang bagi kesuksesan APSC. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan kepentingan MEF dengan pencapaian APSC, maka peran diplomasi pertahanan menjadi penting untuk membangun kepercayaan atau *confidence building measures* (CBM) di antara negara-negara ASEAN.

Sejalan dengan pemikiran Acharya (2001), sebagai negara yang dianggap mampu memimpin di kawasan, Indonesia kemudian menggalakkan diplomasi pertahanan untuk CBM melalui kerangka kerjasama ASEAN. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik antar negara-negara anggota ASEAN. Utamanya, *defence diplomacy for confidence building measures* dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar negara anggota ASEAN dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya. Sehingga, anggapan bahwa MEF

merupakan ancaman akan hilang sama sekali, dan negara-negara tetangga akan percaya bahwa pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia tidak akan digunakan terhadap mereka. Adapun tindakan *defence diplomacy for confidence building measures* pertama yang akan dianalisis melalui kerangka kerjasama ASEAN adalah *principles/declaratory measures*.

Pada pertemuan *Bali Concord II* yang menjadi titik awal dari pendirian APSC, ASEAN membuat suatu kesepakatan bahwa apabila terjadi konflik di antara negara-negara anggotanya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui jalur diplomasi dan mengutamakan perdamaian (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam dokumen resmi Deklarasi *ASEAN Concord II* yang dipublikasikan oleh *ASEAN Secretariat* pada tahun 2003 dengan penjelasan sebagai berikut:

“The High Council of the TAC shall be the important component in the ASEAN Security Community since it reflects ASEAN's commitment to resolve all differences, disputes and conflicts peacefully (ASEAN Secretariat, 2003)”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara tidak akan pernah terlepas dari kemungkinan terjadinya konflik. Konflik di antara Thailand dan Kamboja merupakan salah satu contohnya. Pada tahun 2008, Indonesia menyelenggarakan pertemuan darurat ASEAN bagi resolusi konflik Thailand-Kamboja yang mempersengketakan candi Preah Vihear. Hal ini didasarkan kepada kesepakatan bahwa jika ada masalah antar negara anggota, maka harus diselesaikan di antara negara-negara ASEAN itu sendiri melalui jalur diplomasi (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang ada dalam Deklarasi *Bali Concord II* merupakan salah satu wujud *principles/declaratory measures*. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada argumen Acharya (2011) bahwa Deklarasi *Bali Concord II* berisi pernyataan umum mengenai kepentingan, norma, dan kepercayaan yang telah didukung oleh seluruh negara anggota ASEAN

sebagai panduan untuk melakukan hubungan di antara mereka, utamanya hubungan pertahanan.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pertemuan *Bali Concord II* yang melahirkan APSC, dibentuklah beberapa wadah diplomasi pertahanan baru di ASEAN. Salah satu contohnya adalah *Multilateral Coordinated Patrol* (MCP). Melalui MCP yang diberi nama *Malacca Strait Sea Patrols* (MSSP), Indonesia melaksanakan diplomasi pertahanan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand guna melindungi wilayah perairan Selat Malaka dari berbagai ancaman utamanya yang bersifat non tradisional; seperti pembajakan maritim dan perompakan bersenjata. Merujuk pada Cottey (2006), aktivitas diplomasi pertahanan yang dilaksanakan melalui MSSP adalah patroli terkoordinasi yang merupakan bentuk kerjasama multilateral antar Angkatan Laut Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Dan sebagai bagian dari perluasan kerjasama pertahanan MCP, *Eyes in the Sky* (EiS) juga merupakan bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Adapun aktivitasnya meliputi kerjasama militer antar Angkatan Udara keempat negara ASEAN tersebut.

Principles/declaratory measures yang dilakukan Indonesia melalui kerangka kerjasama pertahanan tersebut adalah dengan merumuskan kepentingan bersama untuk meningkatkan keamanan maritim di Selat Malaka. Di samping itu, Indonesia beserta ketiga negara anggota ASEAN lainnya juga membuat pernyataan umum mengenai norma dan kepercayaan, yaitu dengan menyepakati bahwa kerjasama pertahanan ini terbatas dalam bentuk patroli terkoordinasi yang dilaksanakan secara terpusat di wilayah kedaulatan masing-masing negara (Khalid, 2006). Di samping itu, keempat negara ASEAN tersebut juga membuat kesepakatan mengenai pelaksanaan kerjasama praktis MCP yang meliputi pembatasan keterlibatan pihak eksternal, terkecuali EiS. Pasaunya, kerjasama pertahanan antar Angkatan Udara tersebut masih memungkinkan keterlibatan negara-negara lain secara sukarela, jika dianggap perlu oleh negara-negara anggota.

Berbeda dengan MSSP dan EiS, fokus dari diplomasi pertahanan INDOMALPHI adalah untuk merespon ancaman terorisme dan radikalisme yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bentuk kerjasama pertahanan yang mencontoh *Multilateral Coordinated Patrol* di wilayah Selat Malaka, INDOMALPHI juga didasari oleh deklarasi bersama yang dibuat sebagai bentuk pernyataan umum mereka, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2016. Merujuk pada Kementerian Luar Negeri (2016), *principles/declaratory measures* yang dilakukan Indonesia, Malaysia dan Filipina tersebut berisi kesepakatan mengenai empat jenis aktivitas diplomasi pertahanan, yaitu:

- a. Melakukan patroli di antara ketiga negara dengan menggunakan mekanisme yang ada sebagai modalitas;
- b. Memberikan bantuan segera untuk keselamatan orang-orang dan kapal-kapal yang berada dalam bahaya di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama;
- c. Menetapkan *focal point* nasional di antara ketiga negara untuk memfasilitasi pembagian informasi dan intelijen secara tepat waktu serta koordinasi jika terjadi ancaman darurat dan keamanan; dan,
- d. Untuk membangun *hotline* komunikasi di antara ketiga negara untuk lebih memudahkan koordinasi selama situasi darurat dan ancaman keamanan.

Merujuk pada Cottey (2006), dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui kerangka kerjasama INDOMALPHI melingkupi tiga jenis aktivitas diplomasi pertahanan. Pertama, kerjasama multilateral antar Angkatan Laut dan badan intelijen Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kedua, perjanjian kerjasama bilateral untuk membangun *hotline* komunikasi. Ketiga, penyediaan bantuan militer yang ditujukan bagi keselamatan orang-orang dan kapal yang berada dalam bahaya di wilayah maritim. Adapun pada pertemuan kedua INDOMALPHI, ketiga negara ASEAN yang terlibat juga telah membuat pernyataan bersama terkait lima poin penting yang menjadi kepentingan, norma, dan kepercayaan dari diplomasi pertahanan ini (Ikrami, 2017), yaitu:

- a. Kegiatan militer terkoordinasi;
- b. Patroli maritim dan trilateral;
- c. *Database sharing*;
- d. Kelompok kerja Patroli Maritim Trilateral;
- e. *Malacca Strait Patrol* dapat diadopsi sebagai model.

Lebih lanjut, *principles/declaratory measures* juga dilakukan oleh negara-negara ASEAN melalui forum dialog pertahanan *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM). Seluruh negara anggota ASEAN menyepakati bahwa ADMM harus bersifat terbuka dan memberi nilai tambah bagi kerjasama pertahanan di bawah payung APSC. Di samping itu, merujuk pada *ASEAN Secretariat* (2006), para Menteri Pertahanan juga sepakat bahwa tujuan spesifik ADMM meliputi:

- a. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui dialog dan kerjasama dalam pertahanan dan keamanan;
- b. Memberikan panduan bagi dialog serta kerjasama pertahanan dan keamanan yang melibatkan pejabat senior pertahanan dan militer yang berada di bawah kerangka kerjasama ASEAN serta di antara ASEAN dan negara-negara mitra dialog;
- c. Untuk mempromosikan kepercayaan melalui pemahaman yang lebih besar mengenai tantangan pertahanan dan keamanan serta peningkatan transparansi dan keterbukaan;
- d. Memberikan kontribusi pada pembentukan komunitas keamanan ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam *Bali Concord II* dan untuk mendukung implementasi *Vientiane Action Programme* yang ada di dalam APSC.

Setelah itu, pada bulan Mei 2016 para Menteri Pertahanan juga membuat deklarasi bersama untuk memperkuat upaya ADMM dalam menggalakkan perdamaian dan keamanan regional melalui dialog dan kerjasama menuju komunitas ASEAN yang dinamis. Lebih lanjut, dalam deklarasi tersebut juga dijelaskan bahwa negara-negara ASEAN mendukung pelaksanaan kerjasama pertahanan praktik yang berdasar kepada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integrasi teritorial,

pengambilan keputusan berbasis konsensus, partisipasi atas dasar fleksibilitas, sukarela dan tidak mengikat, aset yang berada di bawah komando dan kontrol nasional untuk mendukung kerjasama terbuka dan inklusif secara efektif dalam menangani tantangan keamanan kontemporer sesuai dengan *ASEAN Charter* dan hukum internasional (ASEAN Secretariat, 2017).

Dan dalam rangka mendukung diplomasi pertahanan negara-negara ASEAN dengan mitra dialog, Indonesia beserta negara-negara anggota ADMM-Plus membuat *principles/declaratory measures* sebagai panduan bagi pelaksanaan hubungan pertahanan di antara mereka. Hal ini tentunya penting guna menjaga hubungan baik di antara negara-negara anggota ADMM-Plus, mengingat adanya ketegangan yang terjadi sebagai akibat dari sengketa wilayah Laut Cina Selatan dan isu-isu keamanan tradisional lainnya. Oleh karenanya, 18 negara anggota ADMM-Plus kemudian menetapkan prinsip-prinsip keanggotaan dalam proses pelaksanaan ADMM-Plus, sebagai berikut:

- a. Negara Plus harus menjadi negara Mitra Dialog ASEAN secara utuh;
- b. Negara Plus harus memiliki interaksi dan hubungan yang signifikan dengan pembangunan pertahanan ASEAN;
- c. Negara Plus harus dapat bekerjasama dengan ADMM untuk membangun kapasitas sehingga dapat meningkatkan keamanan kawasan secara substantif untuk mendukung pembangunan kapasitas di kawasan dalam bidang pertahanan dan keamanan (ASEAN Secretariat, 2017).

Adapun pada kerangka kerjasama *Our Eyes Initiative* (OEI), belum dibuat sebuah deklarasi bersama mengingat pembentukannya masih sangat baru. Akan tetapi, negara-negara anggotanya telah menyepakati bahwa kepentingan bersama dalam mewujudkan kerjasama ini adalah untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme yang ada di kawasan Asia Tenggara. Lebih spesifiknya, OEI dibentuk untuk mencegah kasus Marawi untuk terulang lagi di antara negara-negara ASEAN. Sehingga, kemudian enam anggotanya juga menyatakan secara

bersama bahwa OEI akan dijadikan sebagai wadah diplomasi pertahanan untuk saling bertukar informasi intelijen terkait kelompok ekstrimis yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan aksinya.

4.3.3.2 *Transparency Measures*

Salah satu dampak yang muncul dari fenomena modernisasi militer yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya adalah ketidakpastian strategis. Di sisi lain, ketidakpastian strategis tersebut dapat membahayakan stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentunya dapat menghalangi negara-negara ASEAN dalam mencapai tujuan APSC yakni mewujudkan wilayah Asia Tenggara yang damai dan stabil. Dengan demikian, *defence diplomacy for confidence building measures* menjadi sangat relevan untuk mengurangi ketidakpastian strategis yang terjadi di antara negara-negara ASEAN sebagai akibat dari pembangunan kapabilitas militer yang dikhawatirkan dapat bersifat kompetitif.

Defence diplomacy for confidence building measures yang dijalankan Indonesia ditujukan untuk membantu perhitungan dan prediktabilitas perilaku negaranya, sehingga negara-negara ASEAN lainnya akan memiliki ekspektasi tertentu mengenai perilaku Indonesia, dan begitu pula sebaliknya (Higgins, 2002). Adapun tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengimplementasikan *defence diplomacy for confidence building measures* adalah *transparency measures*. *Transparency measures* dilakukan oleh Indonesia dengan cara membagikan informasi mengenai postur, kemampuan, dan kebijakan nasional Indonesia di bidang militer dan pertahanan dengan maksud untuk mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman di antara negara-negara ASEAN (Acharya, 2011).

Menurut Idiil Syawfi (2017), penyelarasan kepentingan MEF dengan APSC menuntut adanya transparansi kebijakan pertahanan Indonesia bagi negara-negara ASEAN. Sebagai bentuk upaya penyelarasannya, Indonesia membuka kebijakannya kepada

publik dengan menerbitkan Buku Putih Pertahanan dan *ASEAN Security Outlook* (ASO). Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada negara-negara ASEAN bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia tidak bersifat ofensif, dan bukan berarti kondisi yang mengarah kepada perlombaan senjata dapat berakhir menjadi konflik, melainkan dapat berakhir kepada stabilitas kawasan (Idiil Syawfi, komunikasi personal, 10 November 2017). Pada dasarnya, Indonesia hanya ingin menciptakan daya gentar (*deterrence*) agar tidak ada negara yang berani melakukan serangan terbuka kepada Indonesia. Dan Idiil Syawfi (2017) juga menambahkan bahwa hasil dari *deterrence* seharusnya positif, dalam artian tidak ada konflik yang kemudian muncul.

Salah satu bentuk dari *transparency measures* yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menerbitkan Buku Putih Pertahanan Indonesia. Buku Putih Pertahanan merupakan salah satu wujud diplomasi pertahanan Indonesia yang ditujukan untuk menjaga hubungannya dengan negara-negara lain, termasuk ASEAN. Sugeng (2017) juga menambahkan bahwa Buku Putih Pertahanan adalah acuan bagi negara-negara ASEAN yang berisi gambaran pemahaman pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia.

Dalam Buku Putih Pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia (2015) ditegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia tidak ditujukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme angkatan bersenjata, dengan mendasar pada visi, misi, nawacita, dan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD). Melalui pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia mencoba untuk meningkatkan prediktibilitas negaranya sehingga negara-negara tetangganya tidak perlu khawatir mengenai program implementasi kebijakan MEF. Peralnya, perumusan kebijakan MEF memang bukan ditujukan untuk menciptakan kompetisi di antara negara-negara ASEAN.

Buku Putih Pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan RI tersebut faktanya telah dipublikasikan secara bebas, terutama

bagi pihak-pihak tertentu yang berada di lingkungan komunitas pertahanan (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Dan untuk mempermudah negara-negara lain dalam memahami isi Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan RI telah mencetak dan menerbitkannya dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dengan mempublikasikan Buku Putih Pertahanan Indonesia secara bebas, Kementerian Pertahanan RI tentunya mengharapkan *feedback* positif dari negara-negara tetangga yang kemudian dapat mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman mereka terhadap kepentingan Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan MEF. Sehingga, dampak positif yang diharapkan oleh pemerintah melalui publikasi Buku Putih Pertahanan Indonesia adalah adanya keselarasan di antara kepentingan MEF Indonesia dengan upaya pencapaian tujuan APSC.

Sebagai bentuk upaya penyelarasan kebijakan MEF dengan pencapaian APSC, di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia dijelaskan secara cukup detail mengenai kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Sugeng (2017), dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 tersebut juga ditekankan bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan MEF merupakan upaya Indonesia dalam mewujudkan postur pertahanan negara untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan beragam (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Melalui Buku Putih Pertahanan, Indonesia mencoba meyakinkan negara-negara lain bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis yang disesuaikan dengan anggaran pemerintah yang terbatas menjadi faktor utama yang melatar belakangi perumusan dan pelaksanaan kebijakan MEF. Bahkan, hal tersebut juga beberapa kali dipertegas oleh Kementerian Pertahanan RI melalui bukunya dengan menjelaskan arah pembangunan pertahanan negara Indonesia ditujukan bagi peningkatan kekuatan, kemampuan, dan gelar TNI secara proporsional guna menghadapi ancaman militer, nirmiliter dan hibrida.

Adapun Kementerian Pertahanan RI juga telah merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi melalui implementasi kebijakan MEF guna mendukung kinerja TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara. Dalam Buku Putih Pertahanan, dijelaskan apa saja pengadaan alat utama sistem persenjataan yang akan dilakukan Indonesia sebagai bentuk implementasi kebijakan MEF, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Darat meliputi senjata, kendaraan tempur, panzer yonif mekanis, ranpur kavaleri, kendaraan taktis, kendaraan administrasi, kendaraan khusus, alat angkut air, perbekalan udara, pesawat terbang, materiil zeni, alat perhubungan, material khusus intel, munisi, optik, alat optik, materiil komando pasukan khusus, dan alat kesehatan serta rematerialisasi berbagai satuan.
- b. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Laut meliputi Kapal Republik Indonesia, Pesawat udara, Ranpur Marinir, Peralatan Laut Khusus, Material Perbekalan dan Material Khusus. Selain itu, dilaksanakan penghapusan KRI, Pesud, dan Ranpur yang secara operasional sudah tidak efektif.
- c. Pengadaan baru untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Udara pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat VIP/VVIP, pesawatintai, pesawat helikopter, pesawat latihan, Pesawat Terbang Tanpa Awak, Satuan Radar, Satuan Tembak Peluru Kendali jarak sedang, dan Baterai Penangkis Serangan Udara jarak pendek (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Pada dasarnya, pembuatan kebijakan MEF disesuaikan dengan prinsip pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif. Upaya pembangunan kekuatan pertahanan negara harus berpedoman kepada prinsip cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, serta berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Melalui pernyataan

tersebut, Indonesia berusaha menjelaskan bahwa negara-negara ASEAN yang notabenehnya merupakan tetangga adalah bukan musuh, melainkan negara sahabat. Sehingga, tidak mungkin pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia akan digunakan untuk mengancam ataupun menyerang negara-negara ASEAN.

Selain penerbitan Buku Putih Pertahanan, *transparency measures* lainnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menerbitkan *ASEAN Security Outlook (ASO)*. Pada dasarnya, ASO diterbitkan setiap tahun secara berkala dengan tujuan untuk menggalakkan transparansi dan pemahaman yang lebih besar mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN di kawasan ini. ASO merupakan dokumen yang berisi informasi terkait pandangan negara-negara ASEAN terhadap isu keamanan, kebijakan pertahanan masing-masing negaranya, dan kontribusi mereka terhadap keamanan regional.

Secara lebih spesifik, melalui ASO, Indonesia memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai kebijakan MEF guna terciptanya penyelarasan dengan visi APSC. Diplomasi pertahanan Indonesia tergambar melalui ASO dengan menjelaskan bahwa MEF merupakan pengembangan postur militer ideal yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas utama TNI dalam mempertahankan dan menjaga seluruh wilayah NKRI (ASEAN, 2015). Lebih lanjut, di dalam dokumen ASO juga dijelaskan bahwa selain untuk menjaga keutuhan wilayah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan MEF Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan unit tempur dan persiapan unit siaga untuk keadaan darurat, termasuk dalam hal manajemen bencana dan misi pemeliharaan perdamaian dalam mendukung operasi penjaga perdamaian.

Menurut Yoedhi Swastanto (2017), ASO merupakan wujud transparansi untuk menjelaskan kebijakan MEF kepada negara-negara ASEAN terkait tujuan pokoknya dalam menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Dengan demikian, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya kecurigaan dari negara-negara ASEAN

terhadap upaya peningkatan kekuatan pertahanan yang sedang digalakkan oleh Indonesia. Sehingga, hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian visi APSC, yaitu terciptanya kawasan Asia Tenggara yang damai dan stabil.

Di samping itu, Indonesia juga menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan MEF di dalam ASO. Salah satu di antaranya adalah dengan menginformasikan kepada negara-negara ASEAN lainnya bahwa dalam rangka implementasi MEF, Indonesia secara bertahap akan meningkatkan anggaran pertahanannya agar dapat mencapai target yang telah diatur melalui MEF dan juga dapat membantu pencapaian postur ideal TNI. Bahkan, di dalam ASO juga dijelaskan bahwa diharapkan anggaran pertahanan Indonesia dapat mencapai angka 1% dari GDP dan dapat terus meningkat pada dekade selanjutnya (ASEAN, 2017).

Merujuk pada Acharya (2011), setidaknya dengan menerbitkan Buku Putih Pertahanan Indonesia dan ASO, diplomasi pertahanan Indonesia dapat memenuhi dua tujuan dari CBM. Di antaranya adalah untuk mengurangi ketegangan dan kecurigaan di antara negara-negara ASEAN. Kecurigaan tersebut muncul setidaknya disebabkan oleh dua alasan. Pertama, adanya peningkatan belanja militer yang terjadi secara signifikan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, adanya ketegangan yang tengah terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN sebagai akibat dari sengketa Laut Cina Selatan. Di samping itu, dengan adanya keterbukaan informasi melalui Buku Putih Pertahanan Indonesia dan ASO, tentunya dapat mengurangi resiko terjadinya perlombaan senjata atau bahkan perang secara tidak sengaja atau yang disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan (Acharya, 2011).

Pada dasarnya, upaya pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia yang diselenggarakan melalui kebijakan MEF dikomunikasikan secara terus menerus oleh Indonesia kepada negara-negara ASEAN (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Namun, kebijakan pertahanan nasional seperti MEF tidak pernah disinggung secara khusus di dalam forum-forum dialog pertahanan seperti ADMM

dan ADMM-Plus (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman antar sesama anggota ASEAN terkait kebijakan pertahanan dan keamanan nasional masing-masing negara beserta perkembangannya, masih menjadi salah satu program penting yang ada di dalam program kerja tiga tahun ADMM. Adapun aktivitas diplomasi pertahanan yang dimasukkan ke dalam program kerja ADMM meliputi pertukaran informasi serta pertukaran kebijakan pertahanan dan keamanan nasional berikut perkembangannya, dan menyelenggarakan konferensi, lokakarya dan seminar tentang isu atau tantangan pertahanan dan keamanan nasional (ASEAN, 2014).

Penyelenggaraan konferensi, lokakarya ataupun seminar merupakan bagian dari kerjasama praktis yang berada di bawah kerangka ADMM dan ADMM-Plus. Merujuk pada Ingan Malem (2017), diplomasi pertahanan dalam bentuk kerjasama praktis sedang kental di kawasan Asia Tenggara saat ini. Dan sesuai dengan strategi *Dynamic Equilibrium* yang dimilikinya, Indonesia saat ini sedang menggalakkan diplomasi pertahanannya melalui kerangka kerjasama ASEAN agar penyelarasan MEF dengan APSC mampu terwujud.

Salah satunya adalah dengan menjadi ketua bagi EWG dalam hal operasi penjagaan perdamaian atau *Peacekeeping Operations* (PKO) di dalam forum kerjasama ADMM-Plus. Dengan berbagi keketuaannya bersama Australia, Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan EWG-PKO yang ke-10 di Yogyakarta. Dan sebagai salah satu hasil dari pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN sepakat untuk menyelenggarakan latihan lapangan atau *field training exercise* (FTX) di tahun 2019 guna meningkatkan CBM yang telah ada (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017).

Isu-isu terkait pertahanan dan keamanan yang dibahas di dalam forum dialog ADMM dan ADMM-Plus juga kian beragam (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). Di samping itu, dialog antara ASEAN dengan negara-negara mitra juga kian diperkuat dengan

menjadikan ADMM-Plus sebagai wadah bagi pertemuan para Menteri Pertahanan setiap satu tahun sekali, di mana sebelumnya mereka hanya bertemu di forum dialog tersebut setiap tiga atau dua tahun sekali. Terlebih, upaya peningkatan CBM juga dapat terlihat dari bagaimana masing-masing negara anggota bersedia mengirimkan asetnya bagi keberlangsungan latihan bersama ADMM-Plus terkait pengobatan militer dan bantuan kemanusiaan dan bantuan penanggulangan bencana atau *ADMM-Plus Military Medicine and Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise (AMHEX)*. Adapun aset yang dimaksud adalah dalam bentuk alutsista seperti kapal, ataupun tenaga ahli; seperti halnya Indonesia yang mengirimkan tim penyelamnya (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). CBM pada tingkat ini tentunya penting dalam hal membantu pencapaian visi APSC.

Selain itu, diplomasi pertahanan Indonesia untuk menyelaraskan kepentingan MEF dengan APSC juga dilaksanakan dalam area keamanan maritim yang berada di bawah kerangka kerjasama *Multilateral Coordinated Patrol*. Diplomasi pertahanannya dapat tergambar dari bagaimana masing-masing Angkatan Laut dan Angkatan Udara negara-negara ASEAN dapat saling bekerjasama untuk melaksanakan patroli terkoordinasi. Dalam mengedepankan sentralitasnya di ASEAN yang telah disesuaikan dengan konsep *dynamic equilibrium*, Indonesia bahkan menggagaskan sebuah wadah diplomasi pertahanan baru untuk meningkatkan CBM yang berbasis kerjasama intelijen, yang diberi nama *Our Eyes Initiative (OEI)* (Ingan Malem, komunikasi personal, 24 November 2017). Dan gagasan tersebut bahkan sudah disampaikan melalui forum dialog ADMM yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2017. Kerjasama intelijen ini meliputi pembuatan bank data, setelah portal bersama ASEAN sudah dibentuk melalui *ASEAN Information-Sharing Portal* (Yoedhi Swastanto, komunikasi personal, 30 Oktober 2017). Selain itu, kerjasama OEI juga akan diwujudkan dengan melaksanakan pertemuan setiap dua minggu sekali, seperti yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Indonesia pada bulan Januari 2018. Wadah kerjasama

intelijen yang baru diluncurkan tersebut sejauh ini akan beranggotakan enam negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam. Dan fokus dari kerjasamanya adalah untuk memberantas ancaman terorisme yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Merujuk pada Acharya (2011), upaya peningkatan CBM yang dilakukan oleh Indonesia melalui kerangka kerjasama praktis seperti ADMM, ADMM-Plus, *Multilateral Coordinated Patrol*, dan OEI setidaknya diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan CBM. Pertama, diplomasi pertahanan tersebut ditujukan untuk membina komunikasi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN dengan cara yang membantu dalam pencegahan penggunaan kekuatan militer. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah pertemuan antar petinggi militer seperti Menteri Pertahanan dan pejabat sipil yang berada di lingkungan Kementerian Pertahanan negara-negara ASEAN dan mitra. Kedua, diplomasi dalam bentuk kerjasama praktis juga ditujukan untuk membawa pemahaman yang lebih baik tentang masalah keamanan dan prioritas pertahanan satu sama lain. Hal tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan pertemuan, konferensi, lokakarya, dan seminar mengenai isu pertahanan dan keamanan yang ada di Asia Tenggara, melalui empat kerangka kerjasama yang telah dibangun setelah *Bali Concord II* tersebut. Ketiga, diplomasi pertahanan juga diperuntukkan bagi pengembangan rasa kepercayaan strategis yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara melalui penyelenggaraan forum dialog pertahanan, pelaksanaan kerjasama EWG dalam ADMM dan ADMM-Plus, penyelenggaraan patroli terkoordinasi untuk menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, dan pertukaran informasi intelijen melalui OEI.